INOVASI KEBIJAKAN KETENAGA KERJAAN DALAM MENDUKUNG KELESTARIAN UKM YANG BERBASIS PRODUK UNGGULAN

(Studi Pada Pengrajin Kampung Batik Jetis Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh :

FARA ADIBA

NIM. 105030101111019

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

Motto

Kesuksesan Tidak Pernah Final dan Kegagalan

Tidak Pernah Fatal

(Fara Adiba)

Keberhasilan adalah Kemampuan Untuk

Melewati dan Mengatasi Dari Satu

Kegagalan ke Kegagalan Berikutnya Tanpa

Kehilangan

(Winston Chulrhill)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id http://www.fia.ub.ac.id
Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan – Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional – Hospitality dan Pariwisata
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Inovasi Kebijakan Ketenaga Kerjaan Dalam Mendukung Kelestarian UKM Yang Berbasis Produk Unggulan (Studi Pada Pengrajin Kampung Batik Jetis Sidoarjo)

Disusun oleh : Fara Adiba

NIM : 105030101111019

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Malang, 13 Maret 2014

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Sarwono, M. Si	**Drs. Abdullah Said, M.Si**
NIP. 19570909 198403 1 002	**NIP. 19570911 198503 1 003**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 22 April 2014
Jam	: 11.00 WIB – 12.00 WIB
Skripsi atas nama	: Fara Adiba
Judul	: Inovasi kebijakan ketenagakerjaan dalam mendukung kelestarian UKM berbasis produk unggulan (studi pada pengrajin kampong batik Jetis Sidoarjo)

dan dinyatakan Lulus.

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Dr. Sarwono, M.Si	Drs. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002	NIP. 19570911 198503 1 003
Anggota	Anggota
Dr. Mardiono, MPA	Drs. Dwi Yunistyo, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001	19590529 198403 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh fihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalm naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang,

Mahasiswa

TTD

Nama : Fara Adiba

NIM : 105030101111019

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Fara Adiba, 2014, **Inovasi kebijakan ketenaga kerjaan dalam mendukung kelestarian UKM yang berbasis produk unggulan** (Studi pada pengrajin kampung batik Jetis Sidoarjo), Dr. Sarwono, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I, dan Drs. Abdullah Said, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II.

Berkembangnya usaha kecil menengah (UKM) batik tulis Jetis Sidoarjo, merupakan sektor informal yang berkembang pesat. Namun sayangnya saat ini UKM batik tulis Jetis di Kabupaten Sidoarjo masih memiliki beberapa kendala dalam ketenaga kerjaan dalam hal ini usia tenaga kerja produktif enggan berkerja dalam industri formal mereka lebih memilih untuk bekerja menjadi buruh pabrik maupun menjaga toko, hal ini sangat disayangkan dan menjadi pemikiran pemerintah Kabupaten Sidoarjo tenaga kerja pembatik ini seharusnya dapat mengurahi jumlah pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi kebijakan ketenaga kerjaan dalam mendukung kelestarian UKM berbasis produk unggulan. Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan metode analisis yang digunakan adalah melalui model Spardley. Dalam metode analisis ini terdapat pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponen, dan diakhiri dengan analisis tema.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi permasalahan ketenaga kerjaan yang terdapat di kampung batik Jetis Sidoarjo mengalami kemunduran dan adanya keterbatasan kemampuan pada generasi muda, dimana dinas UKM dan dinas tenaga kerja tidak mengetahui adanya permasalahan mengenai tenaga kerja batik Jetis. Untuk menjalankan inovasi kebijakan tersebut maka perlu adanya gambaran umum mengenai tenaga kerja kampung batik Jetis, keinginan kebutuhan serta tantangan persoalan dengan adanya strategi inovatif yang perlu dibidik pemerintah daerah Sidoarjo dalam mendukung kelestrian UKM.

Strategi Inovasi yang dibidik oleh pemerintah daerah Sidoarjo dalam mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis berupa inovasi dari tahap Strategi kerjasama antar Dinas tenaga kerja dengan Dinas UKM dalam pemenuhan tenaga kerja pembatik, Strategi pendampingan dan pelatihan tenaga kerja dalam mendorong kelestarian UKM batik tulis Jetis, Strategi Pengembangan Dan Penguatan Sumber Daya Informasi Dalam Mendorong Pembangunan Sektor Industri Dan Perdagangan informasi yang lancar dan akurat, Strategi Pengembangan Lingkungan Bisnis Yang Nyaman Dan Kondusif

Pemerintah daerah lebih berintegerasi dalam bertugas melestarikan UKM batik tulis Jetis, khususnya dinas dinas yang sudah ditunjuk untuk mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis melalui tenaga kerja pembatiknya di Kabupaten Sidoarjo, agar tidak terjadi kelangkaan tenaga kerja pembatiknya.

Kata Kunci : Inovasi Kebijakan, Ketenaga kerjaan, UKM Kampung batik Jetis

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Fara Adiba, 2014, **Innovation Labor Policy To Supporting Establishing SME'S Bases On Excellent Quality Product** (Study toward the craftsman at *Kampung Batik Jetis Sidoarjo*), Dr. Sarwono, M. Si as Counsellor Instructor I, and Drs. Abdullah Said, M. Si as Counsellor Instructor II.

Development Small Middle Entrepreneurs *Batik Tulis Jetis Sidoarjo*, is non formal sector that develops rapidly. Unfortunately, at this time Small Middle Entrepreneurs *Batik Tulis Jetis* at *Sidoarjo* had few problems, such labours problem. In this case a lot of young people are lazy to work on formal industry, they prefer to choose for working as fabric labors or became shop sales, those cases became *Sidoarjo* Government's problem. In actual The craftsman supposed to be decreases amount of jobless people at *Sidoarjo*. To know needed innovation labor policy to supporting establishing SME'S bases on excellent quality product. This analysis method is qualitative research with description approached used *Spradley Model*. In the analysis method there are descriptive research domain analyses, focus analysis, taxonomy analysis, chosen analysis, component analysis and theme analysis.

Research result show that had problem on manpower at *Kampung Batik Jetis Sidoarjo*, such declined manpower young people, which SME's officer and Human Resources officer of Sidoarjo Government didn't know there is some problem about manpower of The craftsman *Kampung Batik Jetis Sidoarjo*. To apply that policy *Sidoarjo* Government needs to know about manpower, needed, challenges and problems of *Kampung Batik Jetis Sidoarjo*, for applying innovation strategy to support establishing SME.

Therefore, innovation strategy by Sidoarjo Government to supporting establishing SME's *Batik Tulis Jetis* are strategy corporation between SME's officer and Human Resources officer to support manpower craftsman, training of manpower strategy to supporting established SME's *Batik Tulis Jetis*, development strategy and strength of information resources in supporting the industry informative trading comfortable business environment development through apparatus and infrastructure.

Local authority have to be intergrated to establishing SME's *Batik Tulis Jetis*, especially chosen officers to supporting established SME's *Batik Tulis Jetis* such as to increase craftsman manpower at *Sidoarjo*.

Key Words : **Innovation Policy, Manpower, SME's *Kampung Batik Jetis***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Hasil Karyaku Dalam

Menenmpuh Jenjang Perguruan Tinggi Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana/ S1

Kepada Bapak dan Ibu Tersayang dan Tercinta

Kakak dan Adik Tersayang Serta Keluarga Besar

Bapak dan Ibu

Serta semua sahabat-sahabatku

Dan

Teman-Temanku yang telah mendukung

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Inovasi Kebijakan Ketenaga Kerjaan dalam Mendukung Kelestarian UKM yang Berbasis Produk Unggulan (Studi Pada Pengrajin Kampung Batik Jetis Sidoarjo)."**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Sarwono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Drs. Abdullah Said, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta memberikan masukan agar skripsi ini lebih sempurna dan selalu memberikan nasihat-nasihat.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama menempuh studi di Fakultas Ilmu Administrasi.
5. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Hari dan Ibu Masitha, serta kedua saudara Mbak Nuril dan adik Millah yang telah memberikan dukungan kepada saya dengan segenap kasih sayang dan kesabarannya demi memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Sri C. Malasanti, SKM,ST, M.pd selaku Kepala Bidang Industri yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan penelitian.

7. Ibu Listyaningsih, SH selaku Kepala Bidang Perdagangan dalam dan luar negeri yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Sujiyanti, SH selaku Kepala Bidang kesejahteraan ketenaga kerjaan yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Ir.Nurul Huda, MMA selaku ketua paguyupan kampung batik Jetis Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan penelitian.
12. Seluruh pengrajin maupun tenaga kerja kampung batik Jetis Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan penelitian.
13. Terima Kasih kepada sahabatku Emil, Vicka, Sunny, dan Febri yang selalu memberikan motivasi-motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima Kasih kepada teman kos Vivi, Dewihulahula, Merryatul, Inke, Saul, Ella, Zaskia, yukek dan kak Fitri selalu memberikan motivasi-motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Seluruh teman-temanku jurusan Administrasi Publik angkatan tahun 2010 teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
16. Serta semua pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv
RINGKASAN v
SUMMARY vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Kontribusi Penelitian 12
E. Sistematika Pembahasan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik 16
   1. Pengertian Kebijakan Publik 18
   2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik 20
   3. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik. 22
   4. Elemen Sistem Kebijakan Publik. 23
B. Inovasi 24
   1. Pengertian Inovasi 24
   2. Strategi Inovasi. 27
   3. Konsep Inovasi. 29
C. Otonomi Daerah 34
   1. Pengertian Otonomi Daerah 34
   2. Tujuan Otonomi Daerah 35
D. Man Power Planning (Perencanaan Tenaga Kerja) 35
   1. Pengertian Man Power Planning. 35
   2. Tujuan Man Power Planning. 37
E. Usaha Kecil Dan Menengah 39
   1. Pengertian Usaha Kecil Menengah 39
   2. Fungsi Dan Peranan Usaha Kecil Menengah 42
   3. Karakteristik Usaha Kecil Menengah 47
F. Tantangan Dan Masalah Usaha Industri Kecil Menengah 52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 54
B. Fokus Penelitian 55
C. Lokasi dan Situs Penelitian 56
D. Jenis Dan Sumber Data 58
   1. Data Primer 58
   2. Data Sekunder. 58
E. Teknik Pengumpulan Data. 59
   1. Interview/Wawancara 59
   2. Dokumentasi 59
   3. Observasi 60
F. Instrumen Penelitian 60
G. Teknik Analisis Data 61

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 66
   1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo 66
      a. Kondisi Geografis 67
      b. Iklim 68
      c. Budaya 69
      d. Visi Dan Misi 69
   2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo 70
      a. Visi Dan Misi 71
      b. Tugas Dan Fungsi 72
   3. Gambaran Umum Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo 75
      a. Visi Dan Misi. 75
      b. Tugas Dan Fungsi. 77
   4. Gambaran Umum Kampung Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo. 78
      a. Sejarah kampung Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo. 78
      b. Potensi Kampung Batik Jetis Sidoarjo. 79
B. Penyajian Data Fokus Penelitian. 81
   1. Kondisi Tenaga Kerja Yang Disusun Untuk Dapat Mengembangkan UKM Berbasis Produk Unggulan Dikampung Batik Jetis Sidoarjo 81
      a. Gambaran umum tenaga kerja di kampung batik Jetis. 81
      b. Faktor Pendukung Tenaga Kerja Kampung Batik Jetis Sidoarjo.. 88
   2. Identifikasi Keingan, Kebutuhan dari Tenaga Kerja Serta Tantangan Persoalan Membatik Dikampung Batik Jetis Sidoarjo. 91
      a. Identifikasi Internal Dalam Keinginan Kebutuhan Serta Tantangan Persoalan Batik Dikampung Batik Jetis. 91

b. Identifikasi Eksternal Dalam Keinginan Kebutuhan Serta Tantangan Persoalan Batik Dikampung Batik Jetis. 95
3. Strategis Inovatif Yang Perlu Dibilik Pemerintah Daerah Sidoarjo Dalam Mendukung Kelestarian UKM101
a. RenstraSKPD..... 98
b. Program SKPD 100
c. Starategis Inovatif dari Peneliti 102
a) Strategi Kerjasama Antar Dinas Tenaga Kerja Dengan Dinas UKM Dalam Pemenuhan Tenaga Kerja Pembatik. 104
b) Strategi Pendampingan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Mendorong Kelestarian UKM Batik Tulis Jetis. 105
c) Strategi Pengembangan Dan Penguatan Sumber Daya Informasi Dalam Mendorong Pembangunan Sektor Industri Dan Perdagangan..... 105
d) Strategi Pengembangan Lingkungan Bisnis Yang Nyaman Dan Kondusif Melalui Pembinanan Aparatur Serta Sarana Dan Prasana 106

C. Analisis Dan Interprestasi..... 107
1. Kondisi Tenaga Kerja Dalam Mengembangkan UKM Dikampung Batik Jetis Sidoarjo..... 110
a. Gambaran umum tenaga kerja di kampung batik Jetis..... 111
b. Faktor Pendukung Tenaga Kerja Kampung Batik Jetis Sidoarjo..... 112
2. Identifikasi Keingan, Kebutuhan dari Tenaga Kerja Serta Tantangan Persoalan Membatik Dikampung Batik Jetis Sidoarjo. 115
a. Identifikasi Internal Dalam Keinginan Kebutuhan Serta Tantangan Persoalan Batik Dikampung. 116
b. Identifikasi Eksternal Dalam Keinginan Kebutuhan Serta Tantangan Persoalan Batik Dikampung Batik Jetis ... 118
3. Strategis Inovatif Yang Perlu Dibilik Pemerintah Daerah Sidoarjo Dalam Mendukung Kelestarian UKM..... 120
a. Strategi Kerjasama Antar Dinas Tenaga Kerja Dengan Dinas UKM Dalam Pemenuhan Tenaga Kerja Pembatik ... 121
b. Strategi Pendampingan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Mendorong Kelestarian UKM Batik Tulis Jetis. 122
c. Strategi Pengembangan Dan Penguatan Sumber Daya Informasi Dalam Mendorong Pembangunan Sektor Industri Dan Perdagangan 122
d. Strategi Pengembangan Lingkungan Bisnis Yang Nyaman Dan Kondusif Melalui Pembinanan Aparatur Serta Sarana Dan Prasana 123

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 128
B. Saran..... 131

DAFTAR PUSTAKA 133
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Ragam pengertian umum usaha kecil dan menengah	41
2.	Perbedaan usaha kecil dan usaha besar..	48
3.	Sentra Industri Batik Kabupaten Sidoarjo..	82
4.	Tabel SWOT dan TOWS..	103
5.	Tabel SWOT dan TOWS dalam mendukung kelestarian UKM..	121

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Elemen Sistem Kebijakan	23
2.	Beragam Inovasi saling Keterkaitan	30
3.	Proses dan Analisis Data Spradley..	62
4.	Tahap Analisis Data Model Spradley	63
5.	Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM...	74
6.	Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	78
7.	Tenaga Kerja Batik Jetis.	86
8.	Perkampungan Tenaga Kerja Batik	87
9.	Lokasi Kampung Batik.	92
10.	Komunikasi Antar Tenaga Kerja..	96
11.	Peta Analisis	109

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Surat Ijin Riset BANGKESBAPOL Jawa Timur	
2	Surat Ijin Riset BANGKESBAPOL Kabupaten Sidoarjo.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya arus globalisasi yang dihadapai pemerintah modern pada saat ini dituntut untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan yang didasarkan pada upaya untuk bersama-sama melibatkan partisipasi segenap komponen masyarakat (*civil society*) dan swasta (*private sektor*) guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good governace*). Konsep good governace menunjuk pada mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan dalam melibatkan stakeholders yang luas dalam bidang ekonomi sosial politik serta pendayagunaaan sumber daya alam keuangan dan manusia untuk kepentingan semua pihak baik pemerintah swasta serta rakyat dalam cara yang sesuai dengan prinsip keadilan kejujuran persamaan efisiensi transparansi dan akuntabilitas.

Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terutama terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Kunarjo 2002;194) menyatakan bahwa sebagaian besar negara berkembang menginginkan melaksanakan pembangunan dengan cara desentralisasi karena diyakini bahwa dengan cara desentralisasi, pertumbuhan ekonomi dapat terdorong baik. Perencanaan maupun pelaksanaan yang didesentralisir adalah sebagai suatu alat guna mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan mutu perencanaan itu sendiri, di

beberapa negara berkembang telah melaksanakan pengolahaan program-program secara desentralisasi (*Conyres*, 1992:163).

Untuk dapat melaksanaan otonomi daerah diperlukannya perubahan dalam penyelengaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapakan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Usaha Kecil Menengah (UKM). Usaha Kecil Menengah adalah usaha kecil menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr tahun 2001 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200 juta. Usaha ini apabila dikembangkan dengan baik

maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, retribusi dari sektor perdagangan ini dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah yang nantinya akan dapat menambah pendapatan daerah.

Semakin meningkat keberadaan sektor informal ini diharapkan akan berperan penting dalam memajukan daerah, karena keberadaannya dianggap menciptakan keindahan fisik Kota. Usaha Kecil menengah yang mempunyai tempat tinggal permanen, tempat strategis untuk mengembangkan usahanya. Para pemilik usaha kecil menengah pada umumnya memiliki kendala/permasalahan yang berkembang selama ini seperti halnya permodalan, pemasaran, pembinaan, namun belakangan ini terjadi permasalahan mengenai kelangkaan tenaga kerja.

Ditengah keberadaannya yang membuat berbagai macam permasalan tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataanya Usaha kecil Menengah ini telah dapat menunjukkan jati diri. Sebagai suatu usaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan ladang penghasilan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Dengan demikian keberadaan Usaha Kecil menengah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan Kota, tidak dapat dihilangkan begitu saja. Melihat besarnya peranan Usaha Kecil Menengah dalam struktur perekonomian, maka kehadirannya di tengah-tengah kehidupan Kota perlu perhatian untuk dapat melestarikannya dari pemerintah Kota atau daerah setempat.

Sidoarjo tidak hanya terkenal dengan semburan lumpur panas Lapindo. Di Sidoarjo terkenal dengan batik tulisnya yakni batik tulis Jetis yang sudah dikenal sejak tahun 1975 sebagai batik yang memiliki ciri khas warna berani seperti

merah, kuning, hijau dan biru. Berbeda dengan batik Solo dan Yogyakarta berwarna coklat atau sogan. Perajin batik tulis Jetis Sidoarjo kebanjiran pesanan sejak tiga tahun terakhir. Terutama setelah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya Persatuan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengakui batik sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia.

Batik tulis Sidoarjo ini berkembang sejak 1930an, serta mencapai masa keemasan pada 1975. Dahulu perajin memproduksi sarung dan jarik untuk memenuhi pesanan warga Madura. Namun, beberapa tahun terakhir ini pesanan berkurang setelah Madura berhasil mengembangkan batik di daerahnya. Hal ini menyebabkan banyak pengrajin yang gulung tikar pada tahun 1990an, dikarenakan tidak adanya inovasi.

Pesanan batik juga berdatangan dari berbagai daerah seperti Surabaya, Bandung, Ujung Pandang, dan beberapa kota di Indonesia. Batik Jetis Sidoarjo memiliki ciri khas berupa sentuhan motif burung merak yang mengembangkan ekor panjang yang indah. Selain itu motif batik juga dipenuhi warna cerah seperti biru, kuning dan hijau. Berbeda dengan batik Solo dan Yogyakarta yang berwarna coklat dan hanya memakai motif dua warna. Motif batik Jetis Sidoarjo sudah terkenal sejak tahun 1920an. Hal ini diakui sejumlah kolektor batik yang berkunjung ke kampung batik Jetis. Bahkan, para kolektor memiliki batik Jetis yang berumur 80-100 tahun. Demikian pula dengan coraknya yang tak bisa lepas dari gambar burung merak atau burung cipret yang menjadi ciri khas batik klasik Sidoarjo.

Namun, nama Sidoarjo itu tidak pernah muncul sebab hampir semua batik karya perajin Sidoarjo dipakai oleh orang Madura, sehingga disebut dengan istilah batik Madura. Padahal, sebutan batik Madura itu berlaku untuk motif saja. Sedangkan pembuatnya adalah perajin Sidoarjo. Baru sekitar pada tahun 2008 setelah peresmian oleh Bupati pada saat itu sebutannya diganti dengan sebutan batik Sidoarjo biar lebih populer. Oleh karena itu, batik Sidoarjo yang merupakan warisan budaya menjadi kurang dikenal masyarakat luas karena kurangnya kepedulian dari pemerintah untuk mempromosikan batik ini dan belum adanya *action* dari pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan masalah yang muncul tersebut maka Pemerintah Sidoarjo menjadikannya Kabupaten Sidoarjo sebagai sentra UKM (Usaha Kecil Menengah), hal ini merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerahnya (Desentralisasi) agar dapat menjadikan wilayahnya menjadi mandiri. Pemerintah daerah menyadari bahwa sidoarjo menjadi sentra utama pengrajin batik yang berpotensi, maka Pemerintah Sidoarjo itu sendiri memberikan modal baik berupa materi maupun pelatihan dan pemberdayaan yang meliputi berbagai aspek dalam mengembangkan maupun menunjang pemikiran baru yang inovatif bagi warga Sidoarjo, sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi warga Sidoarjonya maupun para pengrajin.

Sebagaimana diketahui usaha Kecil Menengah mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, Usaha Kecil Menengah merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik. Kemampuan Usaha Kecil Menengah perlu diberdayakan dan dikembangkan secara terus

menerus dengan berusaha mereduksi kendala yang dialami Usaha Kecil Menengah, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam pengembangan Usaha Kecil Mengenah diperlukan perhatian khusus dari para stateholder untuk membuat suatu regulasi yang dapat meningkatkan kinerja di sektor UKM dan menciptakan suatu inovasi pengembangan, pemberdayaan baik dari sektor SDM maupun sektor-sektor lainnya dalam kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan pekerjanya di sektor UKM biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada umumnya mereka tidak mempunyai ketrampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja. Oleh karena itu, produktivitas dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Selain itu, mereka yang berada di sektor tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan mereka di sektor lain.

Dalam pembangunan perekonomian suatu daerah saat ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena pola pengembangan ekonomi daerah/lokal yang sedang maupun telah dilaksanakan oleh daerah terkesan kurang sistematik. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab dari kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah dan berakibat rendahnya daya saing ekonomi daerah. Rendahnya daya saing ekonomi daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan arus masuknya

investasi menjadi kurang signifikan. Untuk itu, agar pengembangan ekonomi daerah dapat berhasil dan berdaya guna, maka diperlukan upaya pengembangan potensi tenaga kerja melalui pengembangan produk unggulan daerah (PUD). Namun demikian, agar pengembangan produk unggulan daerah tersebut mampu berkesinambungan dan memberikan dampak pengganda yang besar bagi produk-produk lainnya, maka seyogianya pengembangan produk unggulan daerah yang dimaksud didesain melalui basis Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengembangan produk unggulan daerah memperhatikan unsur-unsur pendukungnya (industri input/pemasok, Perguruan Tinggi, Pasar dan sebagainya), sehingga tercipta keterkaitan yang kuat dan mampu menopang pengembangan PUD secara berkelanjutan. Pengembangan produk unggulan ini juga harus berlangsung secara efektif dan efisien, tidak saja memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya, namun juga dikembangkan dalam manajemen mata rantai, sehingga setiap kegiatan pengembangannnya, mulai dari bahan baku, pengolahan, pergudangan, distribusi dan pencapaian pasar sasaran dapat dilakukan dengan lebih efisien (biaya produksi yang lebih rendah), tepat waktu, tepat jumlah dan tepat distribusi.

Sejauh ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di kampung batik jetis Sidoarjo mengalami kemunduran, hal ini tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Sidoarjo untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik bagi pekerjanya, masyarakat sekitar maupun owner/pemilik studio batik itu sendiri. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan

usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Kerena belum adanya inovasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam memberdayaan tenaga kerja pembatik, belum adanya inovasi hal ini yang menyebabkan kejunahan bagi para pembatiknya. Hal ini dikarenakan efek klaster dan Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif yang di lakukan Pemerintah daerah untuk dapat pengembangan UKM.

Dalam Peraturan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 Dan No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dimana dalam peraturan ini bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan. Maka dalam suatu kebijakan pemerintah di daerah berupa Sistem inovasi daerah (SIDa) yakni keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah pusat, pemda, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi,

dunia usaha, dan masyarakat di daerah agar mampu membangun dan memiliki daya saing industri. Dimana hal ini harus didukung dengan iklim ilmiah untuk terus menghasilkan produk-produk yang inovatif yang dapat bersinergi dengan sumber daya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk tercapainya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengembangkan kegiatan riset bersama yang mampu mengakumulasikan seluruh potensi menjadi lebih baik dan berdaya saing. Oleh karena itu perlu adanya suatu penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang sesuai dengan kebijakan penguat SIDa (sistem inovasi daearah) pada Pasal 3 Ayat (1) & (2) yang berbunyi "Gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Provinsi dan Kabupaten/kota di wilayahnya, Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten/kota".

Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor yang penting dan memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UKM membutuhkan pelindungan berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UKM dalam perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam (Harefa, 2008: 206), bahwa "Regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan

dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat".

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Menurut Rosid (2004: 1), "Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan".

Dengan melakukan berbagai strategi dalam hal persaingan usaha, maka pemerintah diharapkan untuk dapat menciptakan sebuah inovasi kebijakan yang baru dalam kelangkaan tenaga kerja pembatik dan produk yang benar-benar baru atau lain dari yang sebelumnya atau membuat produk yang merupakan perbaikan dari produk yang telah ada sebelumnya. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen tidak hanya sebatas melihat pada nilai atau fungsi dari suatu produk yang dibutuhkan, tetapi konsumen juga memperhatikan apakah produk yang dipilih memiliki nilai tambah atau kelebihan dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Keinginan inilah yang harus dimengerti oleh produsen sebagai landasan untuk melakukan proses inovasi. Perkembangan inovasi yang berhasil akan menjadi strategi yang tepat untuk mempertahankan kedudukan produk di

pasar, karena sebagian besar dari produk pesaing tampil statis dari tahun ke tahun. (Kensinger, 1997 : 60).

Dengan latar belakang di atas, maka muncul fenomena perkembangan UKM yang bersifat statis. Saat ini belum banyak daerah yang telah berhasil dalam melakukan pengembangan UKM berbasis potensi produk unggulan. Jika ada, maka pengembangan produk unggulan daerah masih terlihat parsial, terutama dimulai dari tahapan penentuan produk unggulan daerah, tidak ada adanya *roadmap* pengembangan, dan lemahnya keterkaitan antar unsur dalam tenaga kerja pembatik. Ada daerah yang telah berkembang produk unggulan daerahnya, namun keberlanjutannya tidak terjaga, sehingga sebuah kebijakan akan usang jika dibiarkan terus menerus tanpa adanya inovasi. Selain itu, dikampung batik jetis Sidoarjo cukup maju dalam pengembangan produk unggulannya, dengan pasar yang mampu menampung seluruh produksi yang ada, namun sayangnya, melihat kondisi eksiting di kampung batik jetis yang belum didukung oleh infrastruktur yang sangat vital, yaitu area pakir maupun fasilitas lain seperti ATM dan pengolaan limbah. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perencanaan yang matang dalam pencanangan kampung batik jetis sebagai daerah tujuan wisata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kondisi ketenaga kerjaan yang berada dikampung batik Jetis Sidoarjo ?
2. Bagaimanakah mengidentifikasi keinginan, kebutuhan dari tenaga kerja serta tantangan persoalan membatik dikampung batik Jetis Sidoarjo ?

3. Bagaimanakah strategi inovatif yang perlu dibidik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mensiasati keternagakerjaan di kampung batik Jetis Sidoarjo ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa kondisi tenaga kerja di kampung batik Jetis Sidoarjo dalam mendukung kelestarian UKM yang berbasis produk unggulan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis keinginan, kebutuhan dari tenaga kerja serta tantangan persoalan membatik di kampung batik Jetis Sidoarjo.
3. untuk mengetahui dan menganalisis strategi inovatif yang perlu dibidik oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mensiasati keternagakerjaan di kampung batik Jetis Sidoarjo.

D. Kontribusi penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian ini dapat menambahkan khasanah bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya Kebijakan Administrasi ketenaga kerja dalam kelestarian UKM.

b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan peneliti selanjutnya yang meneliti dan mengkaji permasalahan tentang Kebijakan Administrasi ketenaga kerja dalam kelestarian UKM.

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca secara umum dan kepada peneliti secara khusus.

2. Secara praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangsih pemikiran bagi Dinas sosial dan tenaga keja maupun Dinas koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sidoarjo serta masyarakat Kampung Batik Jetis dalam mendukung kelestrian UKM Berbasis Produk Unggulan.

b. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya inovasi Kebijakan ketenaga kerjaan dalam mendukung kelestarian UKM Berbasis Produk Unggulan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dimaksud agar sesuatu yang dibahas dalam penulisan ini dapat diketahui dan dimengerti secara jelas dari masing-masing bab. Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam lima bab, disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang penjelasan sub bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang

pentingnya penelitian yang merupakan bentuk pernyataan secara ringkas tentang apa yang akan dituju sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, kontribusi penelitian sebagai bentuk pernyataan kemungkinan sumbangan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi pemadatan isi dari masing-masing bab yang akan ditulis.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan kerangka teoritis yang didalamnya membahas landasan teori yang digunakan dalam pemecahan masalah berkaitan dengan judul atau tema yang di angkat oleh peneliti. Sehingga mempunyai acuan dalam melakukan penelitian berkaitan dengan inovasi kebijakan ketenaga kerjaan dalam mendukung kelestarian Usaha Kecil dan Menengah yang berbasis produk unggulan daerah tersebut.

BAB III : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mencakup materi yang terdiri dari : jenis penelitian, Lokasi penelitian dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data dari penelitian.

BAB IV : Hasil Pembahasan

Menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi data fokus pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data

umum yang merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penilaian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian membahasnya.

BAB V : PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang ada secara keseluruan disertai saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

1. Pengertian Administrasi

Administrasi Publik tidak lepas dari pemahaman politik dan administrasi itu sendiri. Untuk memahami administrasi publik, terlebih dahulu membahas tentang administrasi publik. Awal mula makna administrasi adalah adanya jalinan kerjasama antara dua orang yang mempunyai kepentingan bersama. Keadaan itulah yang menunjukkan adanya gejala yang disebut administrasi. Disebut dengan administrasi disebabkan karena dalam jalinan kerjasama tersebut terdapat unsur penting yakni "tujuan" dan "kegiatan kerjasama". Penjelasan tersebut merupakan gambaran sederhana dari arti administrasi.

Secara etimologi, administrasi berasal dari kala Latin yakni *ad* dan *ministrare* yang memiliki arti melaksanakan, menerapkan, dan mengendalikan. Administrasi juga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu: administrasi dalam arti luas, administrasi dalam arti sempit dan administrasi dijumbuhkan dengan *management.* Administrasi dalam arti luas adalah serangkaian kegiatan manusia yang kooperatif terdiri dari organisasi, *management,* komunikasi, informasi, personalia, *financial,* materia, relasi publik. Administrasi dalam arti sempit bermakna tata usaha (Sjamsiar: 2003:9). Sedangkan administrasi dijumbuhkan dengan *management* maksudnya adalah administrasi sering disamakan dengan

management. Akan tetapi pemakaian kedua istilah tersebut dari segi ilmiah berbeda.

Beberapa tokoh dunia menyumbangkan hasil pemikirannya tentang administrasi. Menurut Pfiffner dan Presthuss, administrasi merupakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu adanya penataan dan pengendalian sumber daya manusiawi dan kebendaan. Newman juga memberikan pernyataan bahwa administrasi adalah "...pembimbingan, pemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah beberapa sasaran bersama" (Sugandha, 1992:11). Administrasi diartikan sebagai rangkaian kegiatan kerjasama secara rasional atau efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan (Sjamsiar, 2003:13). Banyak definisi administrasi yang mempersamakan antara administrasi dengan *management.* Akan tetapi administrasi melakukan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin. Sehingga administrasi bukan hanya melakukan kegiatan manajemen yang dilakukan oleh para manajer. Setelah pembahasan administrasi di atas, definisi Administrasi Publik adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusia dan non manusia untuk mencapai tujuan pemerintah. Definisi kedua administrasi publik digambarkan sebagai suatu disiplin yang menggambarkan aktivitas pengelola masalah ketatanegeraan (Zauhar, 1996:31).

Administrasi publik *(public administration)* merupakan salah satu kajian utama yang tidak akan pernah lepas dari Kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan yang pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan

publik. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik.

Penetapan tujuan merupakan langkah utama dan paling penting dalam prosess pembuatan kebijakan. Kebijakan publik harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas karena tanpa tujuan, kebijakan tidak memiliki arti bahkan dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Tujuan-tujuan kebijakan haruslah terkemas pada sebuah visi kebijakan yang futuristik, artinya bahwa keputusan memiliki tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Tanpa hal tersebut, maka kebijakan akan kehilangan arah tujuannya, kebijakan hanyalah sebatas alat untuk memecahkan masalah pada saat kebijakan tersebut dibuat tanpa ada tujuan kedepan yang jelas.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam sebuah negara, pemerintah sebagai pemegang otoritas tunggal mempunyai hak untuk mengatur negara yang dipimpinnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan undang-undang yang berlaku di Negara tersebut. Pemerintah berhak mengeluarkan sebuah pemaksaan dengan kebijakan (*wisdom)* yang dimiliknya untuk mengatur sistem yang berlaku dan memaksa semua pihak untuk patuh kepada keputusan itu atau yang lazim disebut dengan kebijakan (*policy*) publik. Berikut ini, merupakan pengertian kebijakan publik (*public policy*) menurut para ahli.

Kebijakan Publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan (Nugroho, 2003:55).Selain itu,pendapat Anderson yang dikutip oleh

Islamy (2001:19), menyatakan bahwa kebijakan publik ialah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.Implikasi yang timbul dari pengertian mengenai kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson di atas adalah:

a) Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan;
b) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
c) Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
d) Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif – dalam arti: suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
e) Bahwa kebijakan pemerintah – setidak-tidaknya dalam arti positif – didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoratif).

Dalam suatu glossary di bidang administrasi publik seperti yang dikutip oleh Islamy (2001:20), kebijakan publik diberikan arti sebagai berikut:

a) *The organizing framework of purposes and relsionales for government programs that deal with specified societal problems* (susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah-masalah tertentu yang harus dihadapi masyarakat);
b) *Whatever governments choose to or not to do* (adapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan);
c) *The complex programs enacted and implemented by government* (masalah-masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah).

Dari arti mengenai kebijakan publik yang dikutip oleh Islamy diatas, selanjutnya Islamy (2001:20) menyimpulkan, bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu

demi kepentingan seluruh masyarakat. Pada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdi pada kepentingan masyarakat.

Dari kesimpulan pengertian tersebut diatas, kebijakan publik menurut Islamy (2001 : 21) memiliki implikasi, bahwa:

a) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
b) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
c) Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
d) Bagi kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu sistem pembuatan, pelaksanaan, dan pengendalian keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan merupakan sebuah kewenangan penuh dari otoritas tunggal yakni pemerintah untuk dilakukan atau tidak. Hal itu, merupakan suatu proses manajemen yang dilakukan oleh pejabat publik untuk meraih hasil semaksimal mungkin, karena menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.

3. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Secara sederhana seperti yang dikemukakan oleh David Easton dan dikutip oleh Wahab (2002 : 5-6), menyatakan bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator,

para monarki dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurutnya, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan politik-politik dari sistem politik dan dianggap oleh sebagian warga, sistem politik tersebut merupakan pihak yang bertanggungjawab atas urusan urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka.

Berdasarkan penjelasan, maka yang menjadi ciri-ciri kebijakan publik diantaranya:

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
b. Kebijakan hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan progam perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
d. Kebijakan publik berbentuk positif, mungkin pula negatif.Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan akan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan (Wahab, 2002 : 6-7)

Dengan adanya ciri-ciri yang disampaikan diatas dapat diketahui bahwa suatu kebijakan tidaklah disusun secara tidak sengaja, akan tetapi suatu kebijakan disusun oleh para elit politik dalam rangka memenuhi struktur pemerintahan demi menjaga tujuan suatu pemerintah.

3. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik

Secara sederhana seperti yang dijelaskan dalam Nugroho (2006 : 31) mengenai bentuk kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan meliputi:
   1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
   2) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
   3) Peraturan Pemerintah
   4) Peraturan Presiden
   5) Peraturan Derah
b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan.Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota.Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Besama antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota.
c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya.Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Berdasarkan sifat kebijakan tersebut, maka Kebijakan ketenagakerjaan dalam melestarikan UKM berbasis produk unggulan merupakan bentuk dari kebijakan publik yang bersifat makro. Hal ini karena kebijakan tersebut merupakan keluaran dari Bupati untuk mengatur KetenagaKerjaan.

4. Elemen Sistem Kebijakan Publik

Tiga elemen sistem kebijakan yang diadaptasi dari Thomas R.Dye dalam Dunn (2000 : 110) digambarkan dalam gambar berikut :

Gambar 1

Elemen Sistem Kebijakan

Sumber: Dunn (2000, h.110)

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sistem kebijakan melibatkan pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) yang terdiri dari individu atau kelompok individu yang urut terkait dalam kebijakan karena mereka saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) adalah kelompok warga negara, agen-agen pemerintah, dan analis kebijakan.Sedangkan lingkungan kebijakan (*policy environment*) seperti yang diungkapkan Dunn (2000 : 11) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik.

B. Inovasi

1. Pengertian Inovasi

Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Orang atau wirausahawan yang slalu berinovasi, maka ia sapat dikatakan sebagai seorang wirausahwan yang inovatif. Seseorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru / unik yang berbeda dengan yang sudah ada. inovatif juga merupakan sikap penting bagi yang hendaknya dimiliki oleh seorang wirausahawan. Wirausahawan yang selalu melakukan inovasi dalam usahanya. maka keuntungan dan kesuksesan akan didapat. Inovatif merupakan implikasi dari karakteristik wirausahawan yang mampu membawa perubahan pada lingkungan sekitarnya. Inovatif secara tidak langsung menjadi sifat pembeda antara wirausahawan dengan orang biasa, maupun pengusaha. Seorang wirausahawan akan selalu memikirkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, tidak seperti yang dipikirkan dan dilakukan oleh kebanyakan orang.

Kreatif dan inovatif adalah suatu kemampuan untuk memindahkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumber daya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis baik langsung maupun tidak langsung seorang wirausahawan adalah orang yang mampu membawa perubahan pada lingkunganya, maka orang yang sanggup menerima perubahan yang terjadi dan menyikapi perubahan tersebut dengan positif. ia juga berani mengambil resiko berhasil ataupun gagal di setiap jalan yang ia ambil. wirausahawan mampu bertahan pada kondisi perekonomian yang sulit dan serba kalut karena disaat

semua resah. Dalam memiliki kreasi dan inovasi untuk dapat memindahkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumber daya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis. Berdasarkan pengertian tersebut lebih memfokuskan pada tiga hal utama yaitu :

1. Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal.
2. Produk dan jasa yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan dimplementasikan termasuk hasil inovasi dibidang pendidikan.
3. Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan (*improvement*) yang terus menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.

Dari beberapa definisi inovasi yang dibuat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan yang mendasar tentang pengertian inovasi antara satu dengan yang lain. Jika terjadi ketidaksamaan hanya dalam susunan kalimat atau penekanan maksud, tetapi pada dasarnya pengertiannya sama. Semua definisi tersebut menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat). Hal yang baru

itu dapat berupa hasil invensi atau diskoveri, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah.

2. Strategi inovasi

Inovasi pada intinya adalah aktivitas konseptualisasi, serta ide menyelesaikan masalah dengan membawa nilai ekonomis bagi perusahaan dan nilai sosial bagi masyarakat. Jadi inovasi berangkat dari suatu yang sudah ada sebelumnya, kemudian diberi nilai tambah. Inovasi bermula dari hal yang tampak sepele dengan membuka mata dan telinga mendengar aspirasi atau keluhan konsumen, karyawan, lingkungan dan masyarakat. subyek penerapan inovasi sendiri bias individu, kelompok atau perusahaan. Arti bias terjadi dalam perusahaan ada individu atau kelompok yang sangat brilian dan inovatif. Tetapi yang ideal perusahaan menjadi tempat yang terlembaga bagi orang-orang yang terkumpul untuk mengeksplotasi ide-ide baru (Myres dan Marquis, 2003: 28).

Strategi inovasi adalah berkaitan dengan dengan respon strategi perusahaan dalam mengadopsi inovasi. Dalam penelitian-penelitian terdahulu bermacam-macam tipologi strategi inovasi sudah digunakan. Dalam tipologi strategi inovasi terdapat 6 penggolongan yaitu : *offensive innovation strategy*, *defensive, imitative (*suka meniru*), dependent, traditional, dan opportunist strategy.* Penggolongan ini berdasarkan pada kecepatan dan waktu masuk dari perusahaan menuju area teknologi yang baru. Inovasi merupakan sebuah pengenalan peralatan, system, hukum, produk atau jasa, teknologi proses produksi yang baru, sebuah struktur atau system administrasi yang baru, atau program perencanaan baru yang untuk diadopsi sebuah organisasi. Sedangkan tipe dari

inovasi merupakan perilaku adopsi dan faktor yang menentukan dari inovasi mengklasifikasikan inovasi menjadi beberapa tipe, antara lain : *administrative innovation, technical innovation, process innovation, radical innovation.*

Administrative innovation adalah berhubungan dengan struktur organisasi dan proses administrasi yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas dasar pekerjaan dari sebuah organisasi dan berhubungan secara langsung dengan manajemen Perusahaan.

Technical innovation adalah berhubungan dengan teknologi produk, jasa, dan proses produksi. Product innovation adalah produk atau jasa baru yang diperkenalkan pada pengguna luar atau karena kebutuhan pasar. Process innovation adalah elemen baru yang diperkenalkan pada sebuah produksi perusahaan atau operasi jasa, input bahan baku, spesifikasi tugas, pekerjaan dan informasi, dan peralatan yang digunakan, untuk produksi sebuah produk atau membuat jasa pelayanan.

Radical innovation dan *incremental innovation* dapat didefinisikan sebagai derajat perubahan yang dibuat perusahaan dalam pelaksanaan adopsi. Radical Innovation adalah reorientation dan nonroutine inovasi yang merupakan prosedur dasar aktivitas Perusahaan dan menunjukkan permulaan yang jelas dari sebuah pelaksanaan inovasi. Sedangkan *incremental innovation* adalah inovasi yang bersifat rutin, bervariasi dan instrumental. Strategi inovasi adalah berkaitan dengan respon strategi Perusahaan dalam mengadopsi inovasi. Dalam penelitian-penelitian terdahulu bermacam-macam tipologi strategi inovasi sudah digunakan. Menurut Freeman (1978) dalam Hadjimanolis & Dickson (2000) yang

mengemukakan 6 penggolongan tipologi strategi inovasi yaitu : *offensive innovation strategy, defensive, imitative* (suka meniru), *dependent, traditional*, dan *opportunist strategy*. Penggolongan ini berdasarkan pada kecepatan dan waktu masuk dari Perusahaan menuju area teknologi yang baru.

3. Konsep inovasi

Inovasi secara umum dipahami dalam konteks peribahan perilaku. Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers 2003:12, salah satu penulis buku inovasi terkemuka,menjelaskan inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Pengertian dari sumber lain menyebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Telah dijelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru,sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya (UU No. 18 tahun 2002). Sehingga munculnya pembelajaran sebagai proses belajar (pendidikan-pengajaran, pelatihan, pengkajian, dan praktik serta evaluasi) yang membawa kepada pengembangan diri dan perbaikan sikap, perilaku dan tindakan. Dengan hal ini adanya sebuah sistem inovasi suatu kesatuan yang mempengaruhi arah

perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran, Pengembangan, penguasaan, pemajuan dan penerapan/pemanfaatan iptek merupakan bagian integral dari sistem inovasi. Bagaimana sub-subsistem (elemen/faktor) berperan, dan saling keterkaitan (termasuk koherensi kebijakannya), dan dinamika interaksinya menentukan atau mempengaruhi kinerja dinamis sistem inovasi.

Inovasi juga harus memperhatikan budaya dan identitas lokal, sebagai bagian dari proses adaptasi inovasi yang lebih baik. Pemanfaatan identitas lokal, tidak hanya strategis dalam mendekatkan inovasi kepada penggunanya, tetapi juga bagian dari apresiasi atas existing budaya yang ada. Ini tidak lepas dari karakter inovasi yang baru dan cenderung menggeser struktur nilai dan budaya yang lama.

Gambar 2 Beragam Inovasi, Saling Keterkaitan

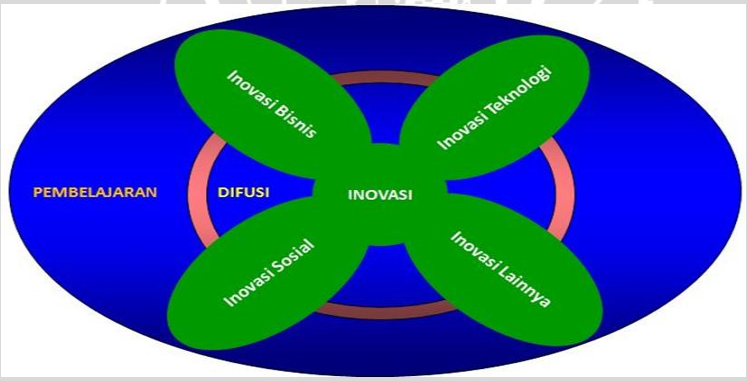

Sumber : Taufiq (2013: 5 jurnal infokop)

Dengan demikian, gambar bagan kerangka diatas mengenai inovasi menunjukan bahwa adanya saling keterkaitan satu sama lain dalam pembelajaran, difusi dan inovasi yang terjadi dalam inovasi bisnis, inovasi sosial, inovasi teknik dan inovasi lainnya. Dalam lingkup difusi dibutuhkan suatu proses di mana

inovasi dikomunikasikan melalui suatu saluran komunikasi tertentu dalam waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial atau masyarakat sedangkan maksud dari Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya (UU No. 18 tahun 2002). Hal ini suatu kesatuan yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran pengembangan, penguasaan, pemajuan dan penerapan/pemanfaatan iptek merupakan bagian integral dari sistem inovasi. Bagaimana sub-subsistem (elemen/faktor) berperan, kesalingterkaitannya (termasuk koherensi kebijakannya), dan dinamika interaksinya menentukan atau mempengaruhi kinerja dinamis sistem inovasi.

Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang terjadi secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dapat mengadopsi inovasi melalui tahapan sebagai berikut :

1. *Initiation* atau perintisan

   Tahapan perintisan terdiri atas fase agenda *setting* dan *matching*. Merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda *setting* ini dilakukan proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah. Selanjutnya dilakukan pencarian dalam lingkungan organisasi untuk menentukan tempat di mana inovasi tersebut akan diaplikasikan. Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan ini juga biasanya dikenali adanya performance gap atau kesenjangan

kinerja. Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian inovasi dalam organisasi. Fase selanjutnya adalah matching atau penyesuaian. Pada tahapan ini permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian atau penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Tahapan ini memastikan feasibilities atau kelayakan inovasi untuk diaplikasikan di organisasi tersebut.

2. *Implementation* atau Pelaksanaan

   Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan organisasi. Tahapan implemenasi ini terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi dan rutinisasi. Pada fase redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai kelhilangan karakter asingnya. Inovasi sudah melewati proses re-invention, sehingga lebih dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi.pada fase ini, baik inovasi maupun organisasi meredefinisi masing-masing dan mengalami proses perubahan untuk saling menyesuaikan. Pada umumnya terjadi paling tidak perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Fase klarifikasi adalah terjadi ketika inovasi sudah digunakan secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi dalam keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini membutuhkan waktu lama, karena mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan, sehingga tidak sedikit yang kemudian justru gagal dalam pelaksanaannya. Proses

adopsi yang terlalu cepat justru menjadi kontra produktif akibat resistensi yang berlebihan.

Inovasi juga tidak selamanya baru (*completely new*), baik dari segi fisik maupun fitur yang melengkapinya. Inovasi dapat terjadi karena sebuah proses yang dikenal dengan nama *re-invention*. Proses *re-invention* ini bukan prose penemuan kembali inovasi secara orisinil, namun lebih bersifat kosmetik atau dikenal dengan *pseudo-innovation*. Proses ini sering dilakukan untuk maksud agar lebih mendekatkan inovasi kepada pengguna. Sering kali inovasi yang muncul masih sangat asing dengan calon pengguna. Dalam sebuah pelayanan publik, proses *re-invention* juga dimungkinkan dilakukan, dengan maksud agar pelayanan publik akan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Maknanya bahwa pelayanan publik pada esensinya adalah sama, namun muatan lokal harus menjadi perhatian, apalagi dengan kondisi beragam etnik, agama, nilai dan budaya lokal di masing-masing daerah. Dengan hal ini adanya sebuah sistem inovasi suatu kesatuan yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran, Pengembangan, penguasaan, pemajuan dan penerapan/pemanfaatan iptek merupakan bagian integral dari sistem inovasi. Bagaimana sub-subsistem (elemen/faktor) berperan, kesalingterkaitannya (termasuk koherensi kebijakannya), dan dinamika interaksinya menentukan atau mempengaruhi kinerja dinamis sistem inovasi.

C. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Liang Gie seperti yang dikutip oleh Nurcholis (2007:1.30) memberikan definisi tentang otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup : mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk.Dalam hal ini hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi daerah luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kegiatan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian lain tentang otonomi daerah adalah otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tanggannya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku.Otonomi dijadikan sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari daerah otonom menjadi negara.Daerah otonom adalah

batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan diberikan otonomi daerah adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah termasuk didalamnya dalam rangka pembangunan nasional.Menurut Widjaja (2005:76) tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada pemerintah daerah adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membutuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

D. *Man Power Planning* (Perencanaan Tenaga Kerja)

1. Pengertian *Manpower Planning* (Perencanaan Tenaga Kerja)

Pentingnya perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau *Man power Planning* di dalam perusahaan. Dari perspektif organisasi, faktor manusia merupakan satu-satunya faktor yang harus dinilai sebagai aset paling utama di dalam perusahaan. Namun demikian, belum semua perusahaan menerapkan kebijakan mengenai pentingnya melakukan penyusunan kebutuhan tenaga kerja. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa hal, misalnya saja kebijakan perusahaan yang belum baku, kebutuhan tenaga kerja selama ini dianggap masih memadai

sehingga tidak diperlukan perencanaan tenaga kerja, program pengembangan perusahaan belum mempertimbangkan faktor manusia sebagai faktor yang strategis, dan masih banyak faktor lainnya yang tentu akan sangat beragam di masing-masing perusahaan.

Manpower Planning (MPP) atau Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses identifikasi dan evaluasi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang akan mengisi jabatan dalam organisasi perusahaan. Kegiatan dalam MPP ini merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi atau perusahaan untuk menjalankan fungsinya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, MPP merupakan salah satu fungsi yang menjadi prioritas setiap bagian di dalam organisasi untuk memenuhi kebutuhan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjalankan fungsi-fungsi lainnya di dalam organisasi.

Penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja pada setiap bagian harus didasarkan pada pertimbangan bahwa struktur organisasi dan *content* dari setiap *job* telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan standar struktur organisasi yang berlaku. Dengan adanya struktur organisasi yang telah sesuai dengan standar didasarkan pada aktivitas organisasi yang bersangkutan dan diarahkan kepada visi, misi, dan tujuan, maka rencana kebutuhan tenaga kerja diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik dan seimbang antara kualitas dan kuantitasnya untuk bahasan mengenai struktur organisasi.

Dari segi kualitas, tenaga kerja yang dibutuhkan harus dapat memenuhi kriteria-kriteria kompetensi, skill, pendidikan, pengalaman, dll yang telah

ditetapkan pada saat proses standardisasi struktur organisasi tersebut di atas. Dengan demikian, dalam menentukan kuantitas jumlah tenaga kerjanya, setiap bagian organisasi diharapkan tidak akan mengalami kesulitan karena telah memahami sistem kerjanya (organisasi) dengan lebih baik.

2. Tujuan *Man Power Planning*

Meskipun bersifat perencanaan, *Man Power Planning* sangat berpengaruh pada kegiatan-kegiatan dalam organisasi sehingga rencana kebutuhan tenaga kerja harus disusun secara komprehensif di setiap aspek organisasi. Tujuan dari penyusunan MPP bagi organisasi baik secara parsial maupun keseluruhan adalah:

1. Organisasi diisi oleh orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan pada jabatan yang tepat (*the right man, on the right place, at the right time, and on the right job*).
2. Menjamin bahwa setiap kegiatan dalam organisasi terlaksana dengan efektif dan efisien.
3. Menghindari terjadinya kekosongan jabatan pada organisasi dalam waktu yang lama.
4. Memperkirakan jumlah tenaga kerja pada waktu tertentu.
5. Membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas atau produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga kerjanya.

Penyusunan MPP merupakan salah satu kegiatan yang perlu untuk ditentukan arahnya oleh para pembuat keputusan. Dalam hal ini, arah tersebut dapat merupakan kebijakan-kebijakan yang digunakan sebagai pedoman dalam

melakukan penyusunan MPP tersebut. Beberapa contoh kebijakan dalam penyusunan MPP, misalnya:

1. MPP disusun berdasarkan pada pertimbangan terhadap jabatan pada struktur organisasi, beban kerja pada jabatan yang bersangkutan, adanya perubahan teknologi, program promosi/rotasi/mutasi/demosi tenaga kerja, *turnover* tenaga kerja, dan atau produktivitas organisasi. Faktor-faktor tersebut diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi setiap bagian di dalam organisasi dalam menilai apakah penambahan tenaga kerja baru diperlukan pada periode tertentu atau tidak.
2. Penyusunan MPP dilakukan untuk menjadwalkan rencana program perekrutan tenaga kerja baik secara internal (misalnya dengan promosi, rotasi, mutasi, atau demosi) maupun eksternal (mencari kandidat dari luar)
3. MPP biasanya disusun untuk jangka waktu satu tahun dan jika terdapat kebutuhan yang mendesak dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, namun tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi (perusahaan).
4. Rangkaian proses penyusunan MPP adalah kegiatan sosialisasi pengisian formulir Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja, identifikasi kebutuhan tenaga kerja, pengisian formulir Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja, Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja (MPP) Tahunan, dan Evaluasi Hasil Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja (MPP) Tahunan.
5. Setiap bagian di dalam organisasi diminta untuk melaporkan MPP tahunannya kepada pihak yang membutuhkan seperti pada fungsi *Human Resources Department* (HRD) atau SDM setelah disetujui oleh pimpinan yang bersangkutan.

Dalam proses penyusunan MPP tentu melibatkan beberapa fungsi di dalam organisasi, untuk itu berikut diuraikan pembagian wewenang dan tanggung jawab dua bagian penting yang akan menjalankan fungsi MPP agar dapat digunakan sebagai pedoman dan untuk menjamin proses penyusunan MPP tersebut terlaksana dengan baik. Seperti berikut :

1. *User* (bagian yang membutuhkan tenaga kerja)

   Masing-masing *user* membuat Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Tahunan atau *Manpower Planning* dan menyerahkannya ke bagian HRD

setiap akhir tahun (misalnya pada awal bulan Nopember). *User* dapat membuat permintaan kebutuhan tenaga kerja yang bersifat mendesak dan di luar dari Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

2. *Human Resources Department* (HRD)

   Melakukan sosialisasi kepada setiap *user* setiap untuk menyusun Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Tahunan (kebutuhan selama satu tahun yang akan datang) sehingga pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dapat terjadwal dengan baik. Membuat daftar Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja (*Manpower Planning*) Tahunan yang didasarkan pada laporan MPP yang telah diterima. Menyusun rencana pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja melalui proses rekrutmen internal dan atau eksternal yang berdasarkan pada prosedur rekrutmen tenaga kerja yang berlaku. Sistem MPP yang disusun harus mempehatikan visi, misi, tujuan, nila-nilai budaya, dan strategi-strategi pengembangan yang dirumuskan oleh para pembuat keputusan sehingga sistem MPP yang dibangun dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

E. Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr tahun 2001 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan

ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200 juta. Kedua menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Usaha Kecil dan kopersi diantaranya adalah

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00
c. Milik warga negara Indonesia
d. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan besar
e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum seperti koperasi.

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam. Menurut Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia (1990) mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya, yaitu suatu usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp.600 Juta. Sedangkan departemen

Perdagangan mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang modal kerjanya kurang dari Rp.25 Juta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang.

Tabel 1

Ragam Pengertian Umum Usaha Kecil dan Menengah

LEMBAGA	ISTILAH	PENGERTIAN UMUM
UU No. 9/95 ttg Usaha Kecil	Usaha Kecil	Aset ≤ Rp 200 Juta di luar tanah dan bangunan Omset ≤ Rp 1 miliar per tahun
BPS	Usaha Kecil	Pekerja 5-9 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20-99 orang
Menteri Negara Koperasi dan UKM	Usaha Kecil	Aset ≤ Rp 200 Juta di luar tanah dan bangunan Omset ≤ Rp 1 miliar per tahun
	Usaha Menengah	Aset >200 Juta Omset Rp 1-10 miliar per tahun
Bank	Usaha Kecil	Aset ≤ Rp 200 Juta

Indonesia		Omset ≤ Rp 1 miliar
	Usaha Menengah	Untuk kegiatan industry, asset < Rp 5 miliar, untuk lainnya asset < Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan Omset < Rp 3 miliar per tahun
Bank Dunia	Usaha Kecil	Pekerja < 50 orang Aset < $ 3 Juta Omset < $ 3 Juta per tahun
	Usaha Menengah	Pekerja < 300 orang Aset < $ 15 Juta Omset < $ 15 Juta per tahun

Sumber : Krishnamurti (2005: 26)

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa usaha kecil adalah suatu usaha yang bercirikan:

a. Kegiatan usahanya tidak formal serta mempunyai struktur organisasi yang sederhana.
b. Jumlah tenaga kerja terbatas, berkisar antara 2 sampai dengan 25 orang.
c. Manajemen dan sistem pencatatannya sangat sederhana.
d. Skala ekonomi kecil dan daerah pemasarannya terbatas

Berbagai pihak termasuk Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat perlu memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui upaya penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil dan menengah mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan besar.

2. Fungsi dan Peranan Usaha Kecil Menengah.

Usaha kecil, khususnya dinegara berkembang secara umum mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting, karena memberikan kontribusi dalam bidang ekono3mi dan sosial, sehingga semua pihak termasuk Pemerintah, Masyarakat; mempunyai kepentingan terhadap keberadaannya. *Clapham* (1991: 6) menyatakan bahwa Pengelolaan dan pengembangan usaha kecil ditentukan atau dipengaruhi oleh Pemerintah melalui beberapa program Pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan usaha kecil. Hal tersebut disebabkan Pemerintah mempunyai kepentingan terhadap keberadaan usaha kecil, karena usaha kecil memberikan beberapa kontribusi atau sumbangan pada pembangunan bidang ekonomi dan sosial, dalam hal: 1. Substitusi import, 2. Meningkatkan atau penunjang Eksport, 3. Investasi, 4. Penggunaan bahan lokal, 5. Penyediaan lapangan kerja (Penyerapan Tenaga Kerja), 6. Efisiensi ekonomi, 7. Melengkapi sektor industri, 8. Melengkapi persediaan konsumen; Produksi, 9. Pengembangan SDM (modal manusia; SDM terlatih), 10. Pembentukan modal tambahan; PDB dan PDRB, 11. Hemat mengunakan modal, 12. Perubahan hubungan perburuan dan sosial, 13. Distribusi pembangunan daerah, 14. Pembangunan sosial dan politik; Distribusi serta memantau kekuatan ekonomi dan politik, Menciptakan

peluang dalam pembangunan bagi seluruh rakyat, Mendorong prakarsa perorangan dan kelompok, Mewujudkan nilai sosial dasar; kebebasan, keadilan, rasa setia kawan.

Usaha kecil merupakan penyumbang besar kepada kekuatan ekonomi negara (Indonesia), dan telah terbukti terutama pada saat krisis atau resesi ekonomi pada tahun 1985 dan 1997, dimana kesulitan pada masa krisis atau resesi ekonomi telah dibantu dan diatasi oleh kehadiran usaha kecil. Sumbangan usaha kecil kepada masyarakat dan negara sangat signifikan, sedangkan bentuk dan jenis sumbangan yang diberikan tersebut adalah: memberikan pekerjaan kepada masyarakat, penciptaan teknologi atau merode baru dan juga produk baru untuk kepentingan negara, membantu perkembangan usaha-usaha besar sebagai pemasok. Jika kapasitas produksi usaha kecil dapat diintegrasikan menjadi besar, langkah ini akan banyak membantu perkembangan usaha-usaha besar.

Apabila dikaitkan dengan beberapa permasalahan bidang ekonomi dan sosial, misal: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, tidak meratanya pembangunan, urbanisasi, serta beberapa hal dalam bidang ekonomi dan sosial lainnya, usaha kecil menjadi lembaga yang digunakan untuk memecahkan beberapa masalah, Tambunan (1999: 1).

Pentingnya usaha kecil; khususnya di Negara berkembang; sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial di negara tersebut, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara kota dan daerah pedesaan, masalah

urbanisasi dengan segala aspek - aspek negatifnya Artinya keberadaan usaha kecil diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi positif terhadap upaya dalam penanggulangan beberapa masalah tersebut. Demikian pula halnya dengan usaha kecil di Indonesia, oleh Pemerintah seringkali dikaitkan atau digunakan dalam upaya untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan usaha kecil di Indonesia seringkali dianggap sebagai kebijaksanaan secara tidak langsung, sebagai kebijaksanaan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijaksanaan anti kemiskinan, atau kebijaksanaan redistribusi pendapatan.

Pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk (Undang-undang RI Nomor 9 tahun 1995):

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah.
2. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.

Pemerintah berusaha menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan melalui aspek:

a. Pendanaan dari aspek persaingan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk

koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil, mencegah struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil, serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

b. Persaingan dari aspek persaingan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil, mencegah struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan usaha kecil, serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

c. Prasarana dari aspek prasarana, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Usaha Kecil, dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.

d. Informasi dari aspek informasi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis serta mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu.

e. Kemitraan dari aspek kemitraan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mewujudkan kemitraan dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.
f. Perizinan usaha dari aspek perizinan usaha, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya pelayanan sistem satu atap dan memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.
g. Perlindungan dari aspek perlindungan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan; rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya, mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil; mengatur penagadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah; serta memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Dari beberapa uraian tersebut, menunjukkan bahwa usaha kecil mempunyai fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam pembangunan bidang ekonomi dan sosial, karena telah memberikan beberapa kontribusi atau sumbangan dalam pembangunan bidang ekonomi dan sosial; kepada semua pihak, baik kepada Pemerintah atau Negara juga kepada Masyarakat atau Bangsa; serta mempunyai

peranan yang sangat penting apabila dikaitkan dengan beberapa permasalahan bidang ekonomi dan sosial, sehingga pembangunan dan pengembangan usaha kecil merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan sosial.

3. Karakteristik Usaha Kecil Menengah

Selain dari fungsi, peran, serta kontribusinya terhadap beberapa pihak; Pemerintah, Masyarakat; usaha kecil (UMKM) mempunyai beberapa karakteristik khusus Ciri/ sifat, kekuatan dan keberhasilan, kelemahan, permasalahan dan kegagalan yang dapat diuraikan Sifat/ ciri khusus usaha kecil adalah terletak pada pengelolaan usahanya, yang mempunyai perbedaan apabila dibandingkan dengan usaha menengah dan usaha besar adalah seperti dalam Tabel 2 sebagai berikut

Tabel 2

Perbedaan Usaha Kecil dan Usaha Besar

No	Usaha Kecil	Usaha Besar
1	Pemilik merangkap sebagai manajer, dan pekerja	Umumnya pemilik bukan manajer
2	Struktur organisasinya sederhana	Struktur organisasinya kompleks
3	Pemilik perusahaan mengerti seluruh pekerjanya	Pemilik perusahaan hanya mengetahui beberapa pekerja
4	Prosentase kegagalan tinggi	Prosentase kegagalan rendah
5	Tidak ada spesialisasi manajer	Terdapat spesialisasi manajemen
6	Modal jangka panjang sulit diperoleh	jangka panjang relatif mudah diperoleh

Sumber : Vernon (1981: 140)

Menurut Vernon (1981: 140-142) karakteristik usaha kecil adalah *"small business usually have distinguishing characteristics: 1. Management; The management of small business is generally independent, since the managers are the owners. 2. Capital requirement; The amount of capital required is relatively small compared with that required by most corporations. It is supllied by one person or at most by a few persons.3. Local operation; For most small firms, the area of operation is local. The employer and employee live in the community in wich the business is located. This does not mean, however, that all small firms serve only local markets. Small importing and exporting firms and canning and packking plants sometimes operate nationwide*".

Pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa dalam operasionalnya, usaha kecil mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

1. Manajemen usaha kecil pada umumnya independen, dan manajernya adalah pemilik perusahaan. Dapat dikatakan bahwa pemilik usaha kecil sekaligus merangkap sebagai pengelola atau manajemen perusahaan. Sebagai pemilik, mereka sebagai investor, dan sebagai pengelola atau manajemen, mereka berposisi sebagai pengambil keputusan. Bahkan selain sebagai pemilik, dan manajemen, mereka juga berfungsi sebagai pekerja yaitu melaksanakan operasional perusahaan. Oleh karena itu mereka mempunyai kebebasan untuk bertindak, sesuai fungsi dan statusnya.
2. Jumlah kebutuhan modal usaha kecil relatif kecil sesuai dengan kegiatan operasionalnya. Jumlah kebutuhan modal usaha kecil relatif kecil sesuai dengan kegiatan operasionalnya. Modal usaha kecil pada umum berasal dari uang pribadi pengusaha atau berasal dari beberapa fihak lain yang berkaitan dengan usaha kecil.
3. Daerah operasi usaha kecil pada umumnya adalah daerah lokal, Pengusaha dan pekerja bertempat tinggal disekitar perusahaannya, dan usaha kecil juga

sebagai pemasok terhadap perusahaan - perusahaan eskpor yang berskala besar. Dalam mempertemukan permintaan pasar yang kecil, usaha kecil dapat melakukan pemesanan barang dalam jangka pendek, sedangkan perusahaan besar tidak dapat melakukannya seperti ini, karena perusahaan besar tidak akan menemukan permintaan pasar yang relatif kecil. Posisi usaha kecil dengan mudah mengakses kebutuhan lokal, karena barang dagangan telah tertutup kontak dengan pihak lain, sehingga dapat di layani oleh pengusaha lokal, volume penjualan usaha kecil relatif kecil, oleh karena itu mereka dapat menjual atau melayani dengan menguntungkan untuk pasar yang kecil. Usaha kecil memberikan kesempatan kepada pemilik untuk berpartisipasi dalam manajemen, dan pada umumnya nilai jasa pekerja dapat diperoleh dengan kesempatan mereka menjadi pemilik parsial. Beberapa karakteristik usaha (industri) kecil lainnya , menurut Tambunan (1999:118-120), yaitu:

1. Proses produksi lebih mekanis dan kegiatannya dilakukan ditempat khusus (pabrik) yang biasanya berlokasi disamping rumah pengusaha atau pemilik usaha.
2. Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di industri kecil adalah pekerja bayaran.
3. Produk yang dibuat termasuk golongan barang-barang yang cukup Sophisticated.
4. Pemilik usaha atau manajer pada usaha kecil, juga mempunyai karakteristik tertentu.

Ciri khusus lainnya pada UMKM, adalah dominasi fungsi dan peran pemilik usaha atau perusahaan (Pengusaha) dalam operasional usaha atau perusahaan; Tampil atau bekerja sendiri. Pengusaha selain berfungsi sebagai pemilik, juga sebagai manajemen atau manajer dan sebagai pekerja atau pelaksana, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan relatif tidak ada. Oleh karena itu, sehat dan kuatnya UMKM, tergantung pada kemampuan, kwalitas, dan nilai dari pemilik (pengusaha) didalam mengelola usaha atau perusahaannya, walaupun terdapat juga peranan pihak lain; khususnya Pemerintah; terhadap operasional usaha atau perusahaan pada UMKM (Helmy, 2008).

Selain dari beberapa hal tersebut, ciri UMKM lainnya, adalah: Dalam melaksanakan kegiatan operasinal usahanya, UMKM melakukan secara individual atau sendiri- sendiri. Berbagai kondisi faktual UMKM tersebut, secara umum masih memiliki kecenderungan untuk berjalan sendiri-sendiri tanpa memikirkan sebuah wadah atau media bersama, yang bisa dijadikan payung atau pelindung untuk meningkatkan daya tawar dan saing usaha mereka. Akibatnya persaingan yang terjadi seringkali menjadi tidak sehat. Walaupun ada organisasi-organisasi yang mewadahi UMKM yang memiliki usaha sejenis, kebanyakan hanyalah bersifat administratif dan profesi semata. Bahkan tidak jarang keberadaan organisasi tersebut, tidak memberikan manfaat atau fasilitasi bagi UMKM, dan cenderung hanya untuk kepentingan elit-elit organisasi tertentu.

Kondisi kelembagaan UMKM yang tidak terorganisasi dengan baik inilah yang menjadi celah bagi kelompok free rider untuk memperdaya UMKM demi

keuntungan mereka semata. Tengkulak/ pengepul maupun pengijon, merupakan contoh kelompok free rider yang selama ini menjadi salah satu penghambat meningkatnya daya tawar maupun daya saing UMKM. Ketergantungan yang berlebihan terhadap para tengkulak/ pengegpul maupun pengijon, menjadikan UMKM tidak sehat dan kuat, sehingga kemandirian mereka menjadi terhambat karena faktor ketergantungan tersebut. Pengembangan kelembagaan yang lebih terorganisir dan memberikan kemanfaatan bagi eksistensi UMKM, pada gilirannya menjadi sebuah keharusan. Kelembagaan tersebut dikembangkan dengan mendasarkan pada kebutuhan dan karakteristik UMKM (Helmy, Eddy S, Yusuf, 2009).

F. Tantangan dan Masalah Usaha Industri kecil menengah

Kuncoro (2004:386) Mengemukakan bahwa cukup berat tantangan yang dihadapi oleh pengusaha kecil untuk memperkuat struktur perekonomian nasiaonal. Pembinaan usaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumberdaya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara spesifik maslah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah : pertama, kelemahan dalam peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk

memperoleh jalur sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Secara garis besar Kuncoro (2006:386), mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori :

Pertama, bagi pengusaha kecil dengan omzet kurang dari Rp.50 juta umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan "aman" sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal besar untuk ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cashflow* saja. Kedua, bagi pengusaha kecil dengan omzet antara Rp.50 juta hingga Rp. 1 Milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut.

Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil jenis ini adalah (Kuncoro;97): (1) Masalah belum dipisahkannya kepemilikan dana pengelolahaan perusahaan, (2) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan pengusaha kecil mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi, (3)

Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat, (4) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan / grup bisnis tertentu atau selera konsumen cepat berubah, (5) Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku, (6) Masalah perbaikan kualitas barang dan efesiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti, (7) Masalah tenaga kerja karena sulit terampil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran sacara riil mengenai suatu situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005:63).

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian dan merupakan unsur yang sangat vital yang sangat menunjang tercapainya hasil dari suatu penelitian. Memperhatikan tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang sedang diteliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunaka pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor (dalam Moleong ; 2002 : 3) berpendapat bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini data yang terkumpul berupa sauna semantik seperti kata-kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraph juga gambar dan hasilnya berupa kutipan-kutipan dari

kumpulan data tersebut yang berisi tindakan, fikiran, pandangan hidup, konsep, ide, gagasan yang disampaikan pengarang melalui karyanya.

Penelian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainya. Ciri tersebut atara lain : latar ilmiah, manusia sebagai alat (*instrument*), metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (*grounded theory*), deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh focus, adanya kritera untuk keabsahan data, desain bersifat sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Tujuan penelitian menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, lebih lanjut mengetahui bagaimana pengembangan Inovasi Kebijakan ketenaga kerjaan dalam mendukung kelestarian UKM berbasis produk unggulan. Metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang barjalan dari pokok suatu penelitian (Sevilla dkk, 1993:71).

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi objek kajian agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data di lapangan, dan untuk menghindari dari data yang tidak relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Spradley (dalam Sugiyono, 2008:377-379) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi

sosial. Menurut Narbuko dan Achmadi (2003) fokus penelitian memuat tentang cakupan atau topik-topik pokok yang diungkapkan atau digali dalam penelitian ini.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah perencanaan pengembangan UKM di Kabupaten Sidoarjo yang dirinci sebagai berikut:

1. Kondisi ketenaga kerjaan yang berada dikampung batik Jetis Sidoarjo dilihat dari aspek :
   a. Gambaran umum tenaga kerja di kampung batik Jetis
   b. Faktor pendukung tenaga kerja kampung batik Jetis
2. Keinginan, kebutuhan dari tenaga kerja serta tantangan persoalan membatik di kampung batik Jetis Sidoarjo dilihat dari aspek:
   a. Internal
   b. Eksternal
3. Starategi inovatif yang perlu dibidik pemerintah daerah Sidoarjo dalam mendukung kelestarian UKM berbasis produk unggulan dilihat dari aspek:
   a. Renstra SKPD
   b. Program SKPD

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya suatu penelitian, Sedangkan situs penelitian adalah letak sebenarnya dimana peneliti nantinya akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-

benar dibutuhkan serta berkaitan dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Peneliti diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, lingkungannya serta segala kegiatan yang ada di dalamnya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan sentra utama UKM, yang mana Sidoarjo mempunyai 17 ribu UKM dan juga 70 sentra industri kecil menengah. Salah satu pruduk unggulan UKM Sidoarjo yakni batik tulis Jetis yang telah ada pada tahun 1975, batik Jetis sektor industri informal yang perlu untuk dikembangkan. Batik tulis Jetis mempunyai corak perwarnaan yang berani dan motif yang sulit untuk ditiru daerah luar Sidoarjo.

Kemudian situs penelitian ditetapkan melalui dua hal antara lain : (1) berlandaskan pada lokasi penelitian, dan (2) berdasarkan asumsi awal peneliti mengenai inovasi kebijakan ketenagakerjaan dalam melestarikan UKM yang berbasis produk unggulan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dan kemudian menetapkan (3) Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, (4) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta Kampung batik Jetis. Pemilihan situs penelitian berdasarkan *stakeholder* program tersebut juga mempertimbangkan keobyektifan data yang diambil peneliti baik dari sudut pandang pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan para tenaga kerja pembatik. Namun demikian, situs penelitian tersebut dapat bertambah ataupun berkurang seiring dengan berjalannya proses penelitian di lapangan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menunjukkan dari mana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda. Sedangkan menurut Arikunto (1998:114), yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Jenis data yang menunjang penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

   Merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat dilaksanakannya penelitian, adapun informan terdiri dari:

   1. Diskoperindag dan Disosnaker
   2. Kepala kantor pusat
   3. Kepala Industri batik Jetis

2. Data Sekunder

   Adalah data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti, tidak secara langsung berhubungan dengan responden. Data sekunder meliputi :

   1. Dokumen-dokumen.
   2. Arsip-arsip.
   3. Catatan-catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.
   4. Rekaman kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
   5. Rekaman media massa, jurnal-jurnal atau sumber lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses menggali data di lapangan, sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi (gabungan) dengan membentuk focus group discussion. Metode triangulasi merupakan metode gabungan dari tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Interview (Wawancara)

   Yaitu merupakan komunikasi langsung antara peneliti sebagai interviewer dengan nara sumber atau orang-orang yang berkaitan erat dengan obyek penelitian sebagai enterviewee. Maksud diadakannya wawancara menurut Lincoln dan Guba, yang dikutip oleh Moleong (2000:135) antara lain: Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverigikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

   Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan penggalian data yang data bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan definisi

sejenis, yang diberikan Arikunto (1998:236), bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

3. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan secara langsung terhadap keadaan obyek yang diteliti dan terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam pengertian psikologik, menurut Arikunto (1998:146), bahwa observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Arikunto (1998:151), yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, dimana dalam penelitian kualitatif peneliti selain sebagai perencana, analis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian, sekaligus sebagai pengumpul data utama.

2. Pedoman wawancara (interview guide) Sebagai panduan atau pedoman dalam melakukan wawancara agar dalam wawancara tidak ada pertanyaan yang tertinggal dan wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur dan lancar.
3. Alat Tulis (catatan) Yaitu untuk mencatat hasil-hasil penelitian, baik dari hasil wawancara maupun observasi.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2009: 248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Melalui penelitian kualitatif, data dapat didapatkan dengan berbagai macam dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ditantang untuk menentukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model *Spradley*. Teknik analisis data menggunakan model *Spradley* ini tidak terlepas

dari keseluruhan penelitian. Keseluruhan proses penelitian terdiri atas: pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponen, dan diakhiri dengan analisis tema. Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokus, dan meluas lagi. Atau juga dapat dikatakan bahwa penelitian dilakukan secara silih berganti antara pengumpulan data dengan analisis data sampai nanti pada akhirnya keseluruhan masalah penelitian akan terjawab. Dalam analisis data model ini memanfaatkan adanya hubungan semantik.

Gambar 3

Proses dan Analisis Data Menurut Spradley

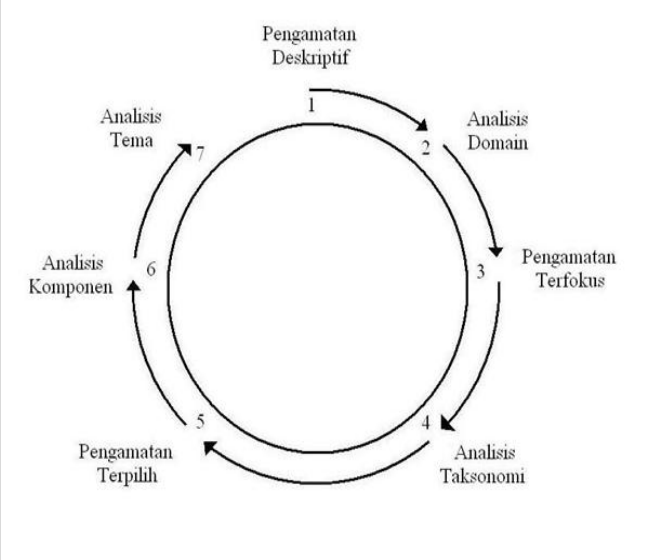

Sumber: Spradley dalam Sugiyono (2009: 244)

Penelitian menggunakan analisis *Spradley* dapat diibaratkan sebuah lingkaran. Dimana bila satu tahap telah selesai maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya hingga tipa tahapan dilalui. Pada umumnya tahapan diatas lebih

disederhanakan lagi oleh *Spradley* menjadi empat tahapan. Seperti yang dikemukakan *Spradley* dalam Sugiyono (2009:255) membagi analisis data dalam penelitian kualiattif berdasarkan empat tahapan yaitu: analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis kultural.Secara lebih detail tahapan penelitian tersebut digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 4

Tahap Teknik Analisis Data Model Spradley

Sumber: Spradley dalam Sugiyono (2009:255)

Analisis data model Spreadly di atas dilakukan melalui empat tahap yang apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Domain;

   Analisis domain dilakukan saat peneliti memasuki objek penelitian yaitu Kabupaten Sidoarjo. Setelah melakukan pengamatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari pengamatan deskriptif ini adalah suatu gambaran umum secara menyeluruh dan berbagai domain terkait gambaran Kabupaten Sidoarjo dalam tenaga kerja pembatik Jetis.

2. Analisis Taksonomi;

   Analisis taksonomi dilakukan dengan menentukan domain-domain tertentu yang dijadikan fokus penelitian.Setelah ditemukan berbagai kriteria dari analisis domain maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis taksonomi dengan cara menentukan dan mengelompokkan berbagai kategori yang terkait dengan fokus penelitian yaitu terkait program ketenagakerjaan dalam mendukung kelestarian UKM berbasis produk unggulan. Analisis ini dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan terfokus. Dalam prakteknya, ketenagakerjaan dalam mendukung kelestarian UKM berbasis produk unggulan yang antara lain meliputi: a) Jumlah pengrajin batik Jetis Sidoarjo, lokasi /tempat kegiatan pembatik, ketersedian pasar, ketersedian teknologi peralatan produksi, keterjangkauan sara transportasi, b) keinginan, kebutuhan serta tantangan

eksternal dan internal dalam kebijakkan ketenagakerjaan dalam mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis.c) Inovasi

3. Analisis Komponensial;

   Analisis komponensial ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terseleksi untuk mencari ciri spesifik pada setiap pelaksanaan penataan dan pembinaan kemudian dikontraskan dengan berbagai permasalahan yang terkait di dalamnya. Dari analisis komponensial ini diperoleh beberapa data yang lebih spesifik terkait tenga kerja dalam mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

4. Analisis Tema Kultural

   Dilakukan dengan cara mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan yang selanjutnya dinyatakan dalam sebuah tema/judul penelitian. Dari hasil analisis tema kultural ini diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan antara ketenagakerjaan dan kelestariaan UKM batik tulis Jetis.

BAB IV

PENYAJIAN DATA dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Sidoarjo

Sejak tahun 1851 Sidoarjo, yang pada saat itu masih bernama Sidokare, adalah bagian dari daerah Kabupaten Surabaya yang dipimpin oleh seorang patih bernama R.Ng.Djoyohardjo, bertempat tinggal di kampung Putjanganom, dan dibantu oleh seorang wedono bernama Bagus Ranuwirjo berumah di kampung Pengabahan. Dengan keputusan pemerintah Hindia belanda no. 9/1859 tanggal 31 djanuari 1859 staatblad No.6, daerah Kabupaten Surabaya dipersempit dan dibagi menjadi dua yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare.

Pada tahun 1859 di Kabupaten Sidokare diangkat seorang Bupati bernama R.T.Notopuro (R.T.P. Tjokronegoro I), berasal dari kesepuhan, putera dari R.A.P. Tjokronegoro Bupati Surabaya. Beliau bertempat tinggal dikampung Pandeaan dan mendirikan masjid di Pekauman, sedangkan alun-alunnya waktu itu di pasar lama. Kemudian dengan pemerintah Hindia Belanda no.10/1859 tanggal 28 Mei No.32, nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten Sidoarjo.

a. Kondisi Geografis

Posisi geografis Kabupaten Sidoarjo terletak berdekatan dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Batas sebelah utara Kabupaten Sidoarjo adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah

barat adalah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Magetan terletak di bagian barat Jawa Timur, sekitar 200 km arah barat Kota Surabaya. Kabupaten sidoarjo terletak antara 112 5’ dan 112 9’ Bujur timur dan antara 7 3’ dan 7 5’ lintang selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.425,25 Ha. Sebagaian besar wilayah Kabupaten Sidoarjo (40,81%) terletak ketinggian 3-10 meter yang berada di bagiaan tengah dan berair tawar . 29,99% wilayah Kabupaten Sidoarjo sebelah timur merupakan daerah pantai dan pertambakan yang ketinggian 0-3 meter dan sisa wilayahnya bertinggian 10-25 meter. Dengan struktur tanah Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha, Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat seluas 4.970,23 Ha, Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha, dan Grumosol Kelabu Tua seluas 870,70 Ha.

Topografi wilayah ini adalah dataran delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakan yang berada diwilayah bagian timur. Di wilayah bagian tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan meliputi 40,81%. Sedangkan di wilayah bagian barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah

pertaniaan 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertaniaan meliputi 29,20%.

Kemudian berdasarkan dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, prosentase penggunaan tanah di kabupaten Sidoarjo, yaitu; persawahan sebesar 36,87% permukiman (kampung, perumahan, lapangan olah raga, kuburan, jasa) sebesar 22,70% perairan darat sebesar 21,88% industri sebesar 2,66%; hutan (sejenis bakau) sebesar 1,45% tanah terbuka (tanah kosong) sebesar 1,23% pertanian tanah kering sebesar 0,37% pertambangan sebesar 0,04% dan lain-lain (jalan & sungai) sebesar 10,79%. Pada konteks hidrogeologi, wilayah ini merupakan daerah air tanah , payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalamaan air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah. Wilayah ini juga terletak diantara dua aliran sungai yaitu kali Surabaya dan kali Porong yang merupakan cabang dari kali brantas yang berhulu di Kabupaten Malang.

b. Iklim

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar 20-35 derajat Celsius.

c. Budaya

Budaya yang terdapat di Sidoarjo merupakan Kebudayaan yang memiliki ciri khas yang ada di Sidoarjo (alun-alun) adalah bendi atau dokar wisata. Bendi atau dokar Merupakan salah satu alat tranportasi yang penting pada jaman dahulu, seiring kemajuan jaman maka bendi atau dokar sudah sangat langka sehingga bagi generasi sekarang ini bendi merupakan sesuatu yang menarik dan diminati khusunya bagi anak-anak.

Dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ruwah pada kalender Islam, tepatnya satu minggu sebelum bulan Romadhon. Upacara Nyadran ini merupakan hari bahagia bagi nelayan pencari kupang, yang tinggal di Desa Balong Dowo, kecamatan Candi. Pada upacara Nyadran semua masyaakat berbondong-bondong berperahu menuju ke laut tempat nelayan mencari kupang.

Di Sidoarjo banyak dijumpai peninggalan-peninggal jaman kerajaan Mojopahit, diantaranya adalah Candi Pari yang berlokasi di Kecamatan Porong yang berjarak + 15 Km kearah selatan kota Sidoarjo. Merupakan candi peninggalan Kerajaan Mojopahit, merupakan candi terbesar di kawasan Sidoarjo. Candi pari didirikan sebagai tanda daerah delta yang sangat subur dan penghasil pertanian yang berlimpah

d. Visi dan misi

Visi

Sidoarjo berkembang menjadi kawasan jasa, perdagangan, industri dan sentra agrobisnis berbasis kerakyatan dengan mengdepankan pemenuhan hak sosial dasar.

Misi

1. Meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
2. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan partipasi masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan gender.
4. Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas bebas dari KKN, dan profesionaldalam kerangka good governance.
5. Menegakkan supermasi hukum,menciptakan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan dan menanggulangi bencana.
6. Meningkatkan peluang investasi dan usaha berbasis potensi perekonomiaan rakyat yang berdampak peningkatan ekonomi masyarakat pada pendapatan asli daerah.
7. Meningkatan ilmu pengetahuaan dan teknologi pertaniaan guna mewujudkan sentra agrobisnis terpadu.
8. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang proposianal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Sidoarjo. Sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Sidoarjo

yang berubah dari agraris industri, maka perindustrian dan perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomiaan Sidoarjo. Hal ini dibuktikan dengan peran sektor industri dan pengolahaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

a. Visi dan misi

Visi

Sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo dan Tugas Pokok Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, maka ditetapkan Visi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo adalah " Terwujudnya Srktor Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM yang tangguh dan mandiri sebagai penggerak ekonomi rakyat" dengan penjelasaan :

Tangguh : Mempunyai Kemampuan, Siap menghadapi persaingan dan perubahan serta dapat keluar dari tekanan yang menghimpitnya.

Mandiri : Mempunyai Kemampuan yang bersumber dari dalam dirinya sendiri tanpa menggantungkan pada kekuatan lain untuk mengembangkan eksistensinya.

Misi

Dalam rangka mewujudkan sektor koperasi, perindustrian, perdagangan, dan ESDM yang Tangguh dan Mandiri, maka misi yang ditetapkan oleh Dinas, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM antra lain :

Misi 1 : Meningkatkan Kualatas Aparatur dan Pengelola koperasi UKM , Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM.

Misi 2 : Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM.

Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Usaha Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM.

b. Tupoksi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM

Tugas Pokok Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan & ESDM Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perkoperasian, Perdagangan & ESDM memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Penyelenggaraan dan pemberian pengawasan, pengamanan teknis atas tugas-tugas pelaksanaan perindustrian dan perdagangan.
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perijinan bidang perindustrian perdagangan.
5. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa.
6. Pelaksanaan pengembangan ekspor hasil industri dan perdagangan.

7. Pelaksanaan konservasi di bidang industri perdagangan.
8. Pelaksanaan penanganan pengendalian bencana yang diakibatkan oleh kegiatan industri.
9. Pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk kegiatan pengembangan industri pengolahan.
10. Pelaksanaan pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat di daerah serta barang dan jasa.
11. Pelaksanaan perlindungan konsumen dan penetapan kemetrologian.
12. Pelaksanaan dan penyusunan serta pengendalian pembangunan pengembangan sistem pergudangan.
13. Pelaksanaan pewasaan penetapn standart industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum, kesehatan dan kerusakan lingkungan.
14. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Gambar 5

Bagan susunan organisasi dinas koperasi perindustrian, perdagangan dan ESDM

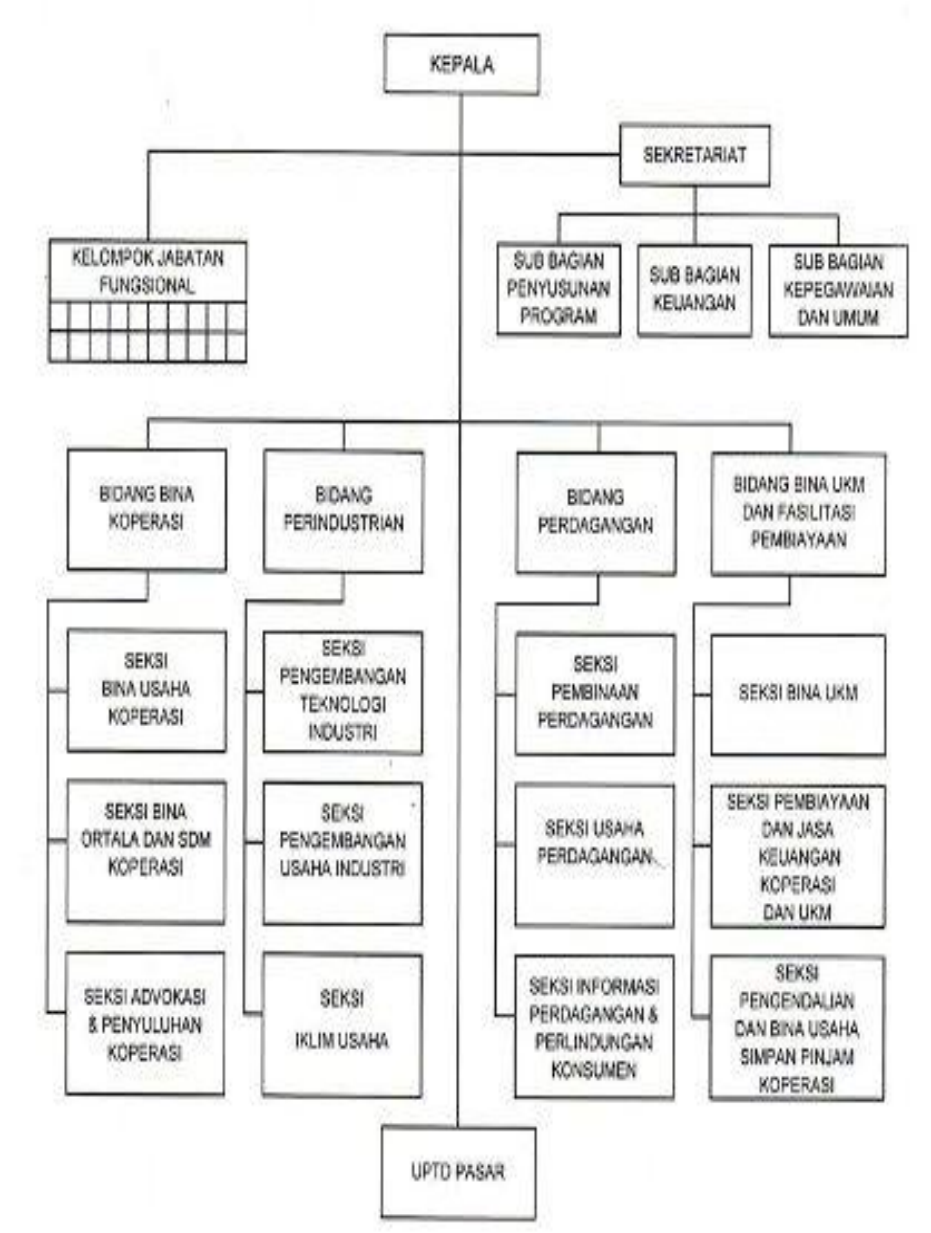

Sumber : profil dinas koperasi perindustrian dan perdagangan

3. Gambaran umum Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan Perda Nomor : 2 Tahun 2001 Tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas-dinas daerah Kabupaten Sidoarjo serta keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 18 Tahun 2001 Tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor : 2 Tahun 2001 Tentang pembentukkan dan susunan organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 21 Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 dapat dikemukakan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertangguh jawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah.

a. Visi dan misi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Visi

Bertumpuh pada visi Kabupaten Sidoarjo dan dan Tugas Pokok Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, maka ditetapkan Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo adalah " Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PMKS) melalui usaha kesejahteraan sosial, serta terciptanya tenaga kerja yang berkualitas, tersedianya kesempatan kerja, hubungan industrial yang dinamis dan perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan".

Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana agar tujuan organisasi dapat terlaksana

dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila Instansi Pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi masalah dan kendala yang dihadapi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Sidoarjo mempunyai Misi sebgai Berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan kesahteraan sosial bagi penyandang masalah kesahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
b. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial / LSM, dalam penyelenggaran pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.
c. Terciptanya tenaga kerja yang berkualitas.
d. Mendorong peningkatan sarana hubungan industrial, persyaratan kerja, kualitas hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat dan tepat guna memperbaiki kesejahteraan pekerja dan keluarganya menuju penghasilan yang layak serta terjaminnya penyelesaian perselisihan industrial.
e. Terpenuhinya pelayanan penanggulangan korban bencana.
f. Meningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi guna mengurangi tingkat pengganggguran terbuka (TPT).

g. Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan penegakan hukum.

b. Tupoksi Dinas sosial dan Tenaga Kerja

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten sidoarjo menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja.
b. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan ketenagakerjaan
c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang sosial dan tenagakerjaan.
d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 6

Bagan susunan organisasi dinas sosial dan tenaga kerja

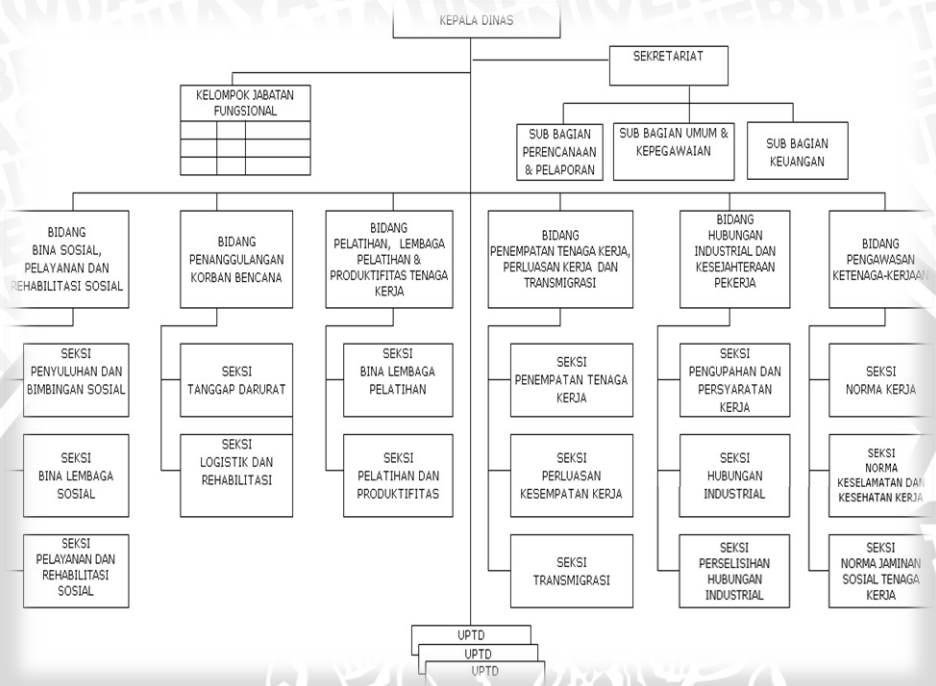

Sumber : profil dinas sosial dan tenaga kerja

4. Gambaran Umum Kampung Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo

a. Sejarah Kampung Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo

Sulit mencari tahu sejak kapan batik mulai muncul di sidoarjo. Banyak sumber yang menyatakan batik sudah mulai muncul sejak tahun 1600-an. Ada juga yang menyatakan batik ada sejak tahun 1990-an. Tidak ada petunjuk yang menegaskan kapan kegiatan perbatikan mulai Di Sidoarjo, namun yang jelas kegiatan perbatikan Di Sidoarjo memang sudah ada sejak jaman kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan adanya sentra-sentra batik diwilayah Sidoarjo. Beberapa sentra batik yang ada antara lain : Desa Kedungcangkring Kecamataan Jabon,

Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, Desa Kenongo Kecamataan Tulangan dan kampung Jetis Pekauman Kecamatan Sidoarjo.

b. Potensi Kampung Batik Jetis Sidoarjo

Seiring dengan berjalanannya waktu, sentra-sentra tersebut hilang tergerus perkembangan jaman. Hal ini dikarenakan sebagaian besar pekerja batik mulai beralih bekerja sebagai karyawaan pabrik dan perusahaan. Saat ini hanya ada dua sentra batik yang ada di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kampung Jetis dan Kampung Kenongo. Dibanding Desa Kenongo yang hanya mempunyai beberapa pengrajin, Kampung Jetis memiliki keunikan tersendiri. Selain jumlah pengrajin yang cukup banyak, lokasi yang terletak di tengah kota sangat potensial sebagai daerah tujuan wisata. Oleh karenanya Kampung Jetis diresmikan menjadi "Kampoeng Batik Jetis" oleh Bupati Sidoarjo pada tanggal 3 Mei 2008 dengan jumlah pengrajin batik sebanyak 35 orang.

Ciri khas batik jetis ada pada corak gambar dan warnanya. Corak yang menjadi ciri khas adalah beras wutah, kembang bayem, tebu, iris-iris tempe serta isuk-sore. Motif yang dibuat berdasarkan situasi dan karakteristik daerah. Pada masa itu sidoarjo adalah pertanian, perkebunan yang sangat makmur. Hasil pertaniaan terbesar adalah padi dan tebu. Sidoarjo bisa dibilang sebagai daerah penghasil beras dan gula terbesar, ini ditandai dengan banyaknya penggilingan beras dan lima pabrik gula terbesar. Sedangkan warna menyolok mengidentifikasikan karakter masyarakat sidoarjo. Sebagai daerah pesisir, tipikal karakter masyarakat sidoarjo adalah jujur, terbuka dan berani. Hal ini terekspresikan pada penggunaan warna-warna yang berani.

Secara sosial budaya, kultur masyarakat di kampung batik jetis adalah masyarakat yang religius mengingat lokasinya yang berdekatan dengan kampung pekauman (kaum :keturunan arab yang menyebarkan agama islam). Selain dengan keturunan Arab, akulturasi budaya juga terjadi dengan keturunan Tionghoa. Dari sini terlihat bahwa masyarakat di kampung jetis mempunyai sifat terbuka, plural dan mau menerima perubahan.

Di dalam kampung jetis tersebar rumah pengrajin batik yang merupakan salah satu sentra batik terbesar di sidoarjo batik jetis mencapai masa kejayaannya di era 70an. Pada masa jayanya jumlah pengrajin di kampung batik ini mencapai 100 orang. Sisa – sisa kejayaan masa lalu tampak pada rumah-rumah tua disepanjang jalan kampung dan gang-gang kecil. Dikampung ini banyak ditemukan bangunan dengan arsitektur kolonial dengan jendela besar dan jeruji besi yang antik. Hal ini menampilkan eksotika tersendiri, ditambah lagi dengan adanya proses industri batik yang dapat disaksiakan oleh pengunjung wisatawan. Dengan kekhasan dan daya tariknya, Kampoeng Batik Jetis layak diposisikan sebagai destinasi wisata.

Masyarakat sebagai unsur penting kepariwisataan tidak dapat ditinggalkan, atau tidak dilibatkan. Kelibatkan masyarakat dan pihak swasta sangat diperlukan karena keterbatasaan pemerintah daerah. Sinergi yang kuat akan ketiga pilar tersebut akan mendorong perkuatan pariwisata, apalagi bila didukung dengan implementasi dari nilai-nilai dari sapta pesona. Implementasi nilai sapta pesona wisata yang terdiri dari keamanan, kebersihan, ketertiban, kesejukan, keindahan,

keramah tamahan, serta memberikan kenagan yang mengesankan pada wisatawan merupakan kunci perkuatan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penyajian data dihasilkan dan disajikan melalui dua langkah analisis yaitu analisis domain dan analisis taksonomi. Dalam hal ini domain adalah fokus penelitian yang diambil oleh peneliti yang terdiri dari kondisi tenaga kerja yang disusun untuk dapat mengembangkan UKM Batik Jetis Sidoarjo yang didalamnya terdapat Gambaran umum tenaga kerja di kampung batik Jetis Sidoarjo dan struktur pendukung tenaga kerja di kampung batik Jetis, Identifikasi keinginan, kebutuhan dari tenaga kerja serta tantangan persoalan membatik di kampung batik Jetis Sidoarjo, starategis inovatif yang perlu dibilik pemerintah daerah Sidoarjo dalam mendukung kelestarian ukm berbasis produk unggulan. Ketiga domain ini lalu ditaksonomikan menjadi subfokus-subfokus seperti di bawah ini :

1. Kondisi Tenaga Kerja Yang Berada Dikampung Batik Jetis Sidoarjo

a. Gambaran umum tenaga kerja di kampung batik jetis

1. Jumlah UKM Batik Tulis Jetis

Berdasarkan data perhitungan sentra industri batik pada tahun 2012 yang ada di Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan ESDM kabupaten Sidoarjo dapat diketahui keberadaan pengrajin pembatik tulis Jetis Sidoarjo yang berjumlah 21 pengrajin dengan jumlah 386 dari keseluruhan tenaga kerja pembatik. Jumlah ini dapat berkembang dengan

berjalannya waktu. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Maya selaku Kepala Bagian bidang industri Dinas Koperasi UKM Perindustrian, Perdagangan dan ESDM :

"Jumlah tenaga pengrajin yang tercatat di Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 sebanyak 386 tenaga pembatik dengan 21 showroom batik yang tersebar. Jumlah ini dapat berubah dengan berkembangnya UKM yang ada di kampung batik Jetis Kabupaten Sidoarjo." (Hasil wawancara pada tanggal 15 November 2013 pada pukul 09.00

Tabel 3

Sentra industri Batik Kabubaten Sidoarjo

No	Nama Sentra/ komoditi	Alamat			Merek	Industri	Tenaga Kerja (orang)		
		Pemilik	Telefon	Jalan/ Desa/Kelurahan			P	L	Jumlah
1.	Batik Amri	M.Amir Mutamakkin	8929709 /081-7036852 50	Jetis III No. 116	Amri	Batik	3	12	15
2	Batik Tulis	M.Zainul Choidim	031/726 80822	Jetis GG II No.64	C" Amali" H	Kain Batik	1	6	7
3	Shaffa Marceau	Astri Lazuardhini Kunto S.P	7111811 17/081-3573536 16	Jl. sekawan molek VII Blok 1 A/23 perum BCF	Kunto	Batik Tulis Halus	10	25	35
4	Amri Jaya	M.Zainal Arifin	8952434 /081-3577867 86	Jetis Jl. Pasar Jetis 17	Amri Jaya	Batik Tulis	3	23	26
5	Kenongo Tulangan	Eko Hadi Purnomo	8852227 /0857-7532150 594	Jl.Raya kenongo Tulangan	BAK Narti	Kain Batik	2	13	15

6	Amali	Safa'ah	3496673 /087851 932774	Jetis GG II/72A RT.12 RW.3	Batik Tulis Amali	Sewek, Sarung, Kain, Slendang	1	3	4
7	Batik Daun Traditional	HJ.Mujiati	8925490 /081-330430668	Jl. Diponegoro Jetis III No.90	Batik Daun Traditional	Batik Tukis Khas Sidoarjo	3	19	21
8	Batik Barro	H.Achmad Saiku	8952140 /081-6542698	Gajah Magersari No.10 Rt 14 Rw 5	Batik Barro	Kain Batik	2	5	7
9	Batik Ibrahim Salam	Ibrahim	9239089 5/085-730203389	Jetis GG 4 Rt 15 Rw 3	Ibrahim	Motif Madutaan	1	2	3
10	Batik kasmatun	Zainal Afandi	8952464 /085-730576671	Jetis II/91 A Rt 12 Rw 3	Batik" Kasmatun"	Batik Tulis	2	5	7
11	Batik Tulis Azizah	.Nurwahyudi	8967236	Jetis III/115 Sidoarjo	Batik Tulis azizah	Batik Tulis	4	16	20
12	Batik Al-huda	Ir.Nurul Huda	085-230725506	Sidokare Asri Aw 18 Sepande	Al-Huda	Kain Batik	3	32	35
13	Batik Tulis Yassaro	Nurul Tholiah	8964235	Jetis III/114	Yassaro	Batik Tulis	1	4	5
14	Ananda Bilqis	Hj.Djaukariah	8941248 /082142 522049	Jl. Jetis 33	Ananda Bilqis	Batik Tulis	1	15	16
15	Batik Tulis	Adenan	8964283 /087-	Jl. Jetis 2/66	Adam	Kain Batik	1	5	6

	Adam		853550268						
16	Batik Namiroh	H.Musyafa'ah	8921101	Jetis 3/02	Namiroh	Sarung, selendang,jarik	2	23	25
17	H.I	H.Ischak	8969670	Jetis GG II/70	H.I	Batik Tulis	1	9	10
18	Batik Tulis	Siti Mariyam	0888311 5402/40 009424	Jetis GG IV No. 168	Dunia Wanita	Batik Tulis	2	8	10
19	Batik Rahmad	M.yajid	8947804	Jetis IV/150 Lemah Putro	Batik Rahmad	Sewek, Sarung, selendang	5	26	31
20	Murni & Artis	Mursidini S Texs	8966184 , 081-6545899 1	Jetis III/122	Tepi Sungai	Kain Batik	5	70	75
21	Batik Tulis Dahlia	H.Miftach	8951592	Jl. Pasar Jetis 14	Dahlia	Batik Tulis	1	12	13

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011

Data pengrajin batik tulis Jetis Sidoarjo yang hanya dimiliki oleh dinas perindustrian, perdagangan dan UKM bahkan dinas sosial dan tenaga kerja tidak memiliki data mengenai jumlah tenaga kerja pembatik Jetis, hal ini dikarenakan tidak adanya wajib lapor pengusaha UKM pada dinas sosial dan tenaga kerja yang sesuai dengan UU. No 7 Tahun 1981. Sesuai dengan menuturan kepala bidang hubungan industrial pekerja & kesejahteraan pekerja :

"Kami tidak mengatur tenaga kerja pembatik dikarenakan itu tidak ada didalam UU No 7 Tahun 1981, UKM batik serta tenaga kerja wewenangnya diskoperindag . Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam mengaturnya kami hanya mengatur yang sesuai dengan tupoksi dinas" , hasil wawancara (27 Januari 2014, Pukul 13.00 WIB).

Kedua SKPD tidak mengetahui berkembangan tenaga kerja pembatiknya yang mengalami kelangkaan. Sehingga terjadinya ketidak efesien dalam memproduksi dengan jumlah tenaga kerja. Dan pengusaha pembatik Jetis tidak melalukan tindakan lapor kepada SKPD yang berwewenang terhadap berkembangannya. Kelangkaan tenaga kerja pembatik ini dikarenakan tidak ada kaum muda yang berlajar membatik dan bekerja pada sektor industri rumah tangga kebanyakan para pemudanya bekerja pada sektor swasta. Pengusaha kerajinan batik tulis Jetis Sidoarjo kesulitan mencari pekerja untuk menghasilkan kain batik berkualitas, hanya tersisa segelintir pembatik, sehingga banyak yang bangkrut.

Hal ini sesuai dengan menuturan pengusaha pemilik usaha kerajinan Batik Dahlia Pak Miftach di Kampung Batik Jetis :

Kami terpaksa mempekerjakan pembatik dari Kabupaten Trenggalek, saat ini sangat sedikit generasi muda yang tertarik membatik demi melestarikan budaya bangsa dikarenakan sektor UKM batik ini kalah dengan sektor industri. Ironisnya, dulu 10 warga Australia, Jerman, Amerika, Belgia dan Kanada belajar membatik di Batik Dahlia. "Mereka

tertarik mengembangkan batik," (Hasil wawancara 25 Januari, Pukul 10.00) .

2. Tempat/ lokasi kegiatan membatik

Mengingat para penguasaha batik tulis jetis pada umumnya, telah menyediakan dapur tempat pembuat batik dibelakang toko atau *showroom* mereka. Hal ini sengaja di lakukan para pemilik karena menginginkan segala kegiatan para pembatik dilakukan di situ mulai dari setengah jadi hingga menjadi barang jadi agar pemiliknya dapat juga pengawasi prosesnya dengan baik semuanya ini dilakukan karena ingin mendapatkan hasil yang batik yang terbaik dan tidak mengecewakan para pelanggan. Sehingga kebanyakan wisatawan tertarik untuk mengetahui proses kegiatan pembatik ditempat para showroom pembatik tulis jetis ini, dengan adanya tenaga kerja pembatik pada umumnya telah memberikan warna corak yang menarik makna yang tersirat. Seperti halnya ibu Yuliatini pekerja asal showroom Azizah ini yang telah bekerja dengan penuh ketekunan dan kesabarannya.

Gambar 7

Tenaga Kerja Batik Tulis Jetis Sidoarjo

Sumber pengamatan Saat Wawancara

Gambar diatas adalah salah satu gambaran tenaga kerja pembatik tulis Jetis yang menggambarkan sentuhan penuh makna didalam kainnya. Meski kegiatan membatik merupakan kegiatan yang terlihat membosankan, akan tetapi membatik adalah sebuah jalan hidup turun temurun yang harus terjaga kearifannya.

Gambar 8

Perkampungan pembatik Jetis

Sumber pengamatan saat wawancara

Pemililihan lokasi tempat kegiatan pembatik terdapat di gang II, II dan sekitarnya dikampung Jetis kecamatan Sidoarjo. Disanalah terdapat pemukiman para pembatik yang masih banyak tinggal di dalam kampung. Sedangkan showroom atau galeri dan toko batik tulis Jetis berjajar di sepanjang kedua sisi jalan pasar Jetis. Di sisi luar gang III kampung Jetis, di sepanjang jalan ini pula kita bisa melihat beberapa rumah bangunan tua zaman belanda merupakan saksi kekayaan batik tulis Jetis di masa lalu.

3. Waktu Kegiatan membatik

Sistem kerja yang diterapkan pada masing-masing sentra pembuatan batik berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya terdapat majikan sebagai pemilik modal dan pembatik sebagai buruh. Hubungan kerja yang terjadi antara majikan dan buruh berbeda-beda, bersifat semi formal dan formal. Hubungan semi formal dijumpai pada sentra batik yang menerapkan manajemen tradisional,ubungan yang bersifat formal dijumpai pada perusahaan batik yang menerapkan sistem manajemen profesional.

Waktu kegiatan membatik para tenaga kerja ialah setiap hari tidak ada waktu tertentu saat-saat banyaknya permintaan pasar. Dengan demikian maka yang terjadi ialah pada pekerja dengan ketekunan saat membatik saat pasar mulai ramai mereka bekaerja dengan santai tanpa ada rasa tertekan hal ini dikarenakan agar para tidak merasa kejenuhan saat para pembatik melaksanakan kegiatannya. Kegiatan pembatik dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan jam istirahat mereka 30 menit untuk makan siang. Hal inilah yang telah disampaikan sesuai

dengan hasil wawancara dengan memilik batik tulis Amir Jaya Jetis kabupaten Sidoarjo yaitu Bapak Amir :

"Para tenaga kerja pekerja setiap hari pada jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 dan jam lembur tergantung keadaan pasar, para pekerjanya ada yang tepat waktu ada yang tidak asal mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sempurna" (hasil wawancara tanggal 5 januari 2014 pada pukul 10.00)

b. Faktor Pendukung Tenaga Kerja Kampung Batik Jetis

Tumbuh kembangnya batik tulis Jetis ini dikarenakan memiliki ciri khas tersendiri yang sulit di tiru dan bebas berekspresi, hal ini juga terlepas dari kreatifan para pekerja pembatik dimana adanya faktor pendukung tenaga kerja kampung batik Jetis. Berdasarkan analisis diperoleh empat faktor yang layak untuk pendukung tenaga kerja yaitu: berdasarkan kualitas bahan baku, ketersediaan pasar, ketersediaan teknologi peralatan produksi, dan jangkauan sarana transportasi.

1. Kualitas Bahan Baku

Rata-rata faktor ketersediaan bahan baku dikampung batik jetis cukup memenuhi permintaan konsumen. Ketersediaan bahan baku di Kabupaten Sidoarjo sangat mutlak diperlukan untuk menghasilkan produk kerajinan bermutu. Pengrajin di Kabupaten Sidoarjo mengeluh jika mendapatkan bahan baku yang jelek tidak sesuai. Tidak kesesuaian bahan baku bagi pengrajin akan semakin susah untuk memenuhi permintaan dan proses produksi menjadi terlambat dari jadwal dan biaya produksi meningkat dua kali lipat. Hal inilah yang telah disampaikan

sesuai dengan hasil wawancara dengan tenaga kerja pembatik di *showroom* batik tulis Amir Jaya Jetis kabupaten Sidoarjo yaitu Ibu Lia :

> " Jika kualitas Bahan baku jelek ya maka hasil batik kita juga jelek maka sia-sia, membatiknya pun susah dengan kualitas jelek kebanyakan menyatuan warna tidak sempurna. Sayang tenaganya kalo bahan bakunya jelek. Ini juga menghambat proses produksi kita"(hasil wawancara tanggal 5 januari 2014 pada pukul 13.00 WIB)

2. Ketersediaan Pasar

Faktor ketersediaan pasar bagi pengrajin masih terbatas berkisar regional jawa timur meski kini permintaan pasar cukup tinggi dan memulai pesanan dari luar jawa. Jangkauan pemasaran produk kerajinan masih belum optimal. Namun ketersediaan pasar di Sidoarjo relatif lebih tinggi karena konsumen lebih mudah menjangkau produk dengan mendatangi lokasi sentra kerajinan batik tulis Sidoarjo, selain itu kedekatan dengan pusat perdagangan (Surabaya) juga mendukung kemudahan pendistribusian produk ke daerah lain. Faktor pendukung tenaga kerja ini adanya kesediaan pasar yang mendorong majunya industri batik Jetis.

Maka dengan adanya pasar tenaga kerja pembatik ini akan merasa bangga telah banyak menghadirkan warna dan makna disetiap kainnya, agar dapat dilihat oleh para konsumen setia batik. Tenaga kerja pembatik ini juga merasa senang apabila *showroom* atau galeri tempat mereka pekerja ramai dikunjungi wisatawan. Kondisi ini dihimbau agar pasar batik tulis jetis tetap ramai dinikmati dari berbagai kalangan mulai dari yang muda maupun kalangan tua.

3. Ketersediaan Teknologi Peralatan Produksi

Ketersediaan sarana teknologi penunjang proses produksi batik tulis Jetis Sidoarjo masih relatif sederhana dan hampir dari setengah pengrajin batik tulis Jetis di Sidoarjo masih menggunakan peratan teknologi produksi yang sederhana. Namun perkembangan peralatan pada pengrajin batik Sidoarjo dipengaruhi oleh lingkungan industri yang berkembang di kawasan tersebut. Pada pengrajin batik tulis Jetis dengan peralatan yang jarang di perbaharui, pengrajin kurang mempertimbangkan aspek penyusutan peralatan terutama acuan ukuran kualitas batik tulis Jetis dan produk yang dihasilkan.

4. Keterjangkauan Sarana Transportasi

Keterjangkauan sarana transportasi untuk kegiatan usaha kerajinan berbeda-beda disetiap pemilik *showroom* batik tulis jetis. Tenaga kerja pembatik dan pemilik *showroom* Pengrajin di Sidoarjo mengalami hambatan dalam biaya transportasi yang semakin meningkat, kenaikan harga bahan bakar minyak dirasakan amat memberatkan dalam melakukan pengiriman ke luar daerah. Selain itu kepemilikan sarana transportasi yang masih rendah mengakibatkan semakin mahalnya biaya yang berdampak pada keterjangkauan sarana transportasi rendah. Pengrajin Sidoarjo dapat mengakses sarana transportasi Kereta Api untuk pendistribusian produknya, keberadaan sarana transportasi kereta api meringankan beban biaya transportasi karena pengiriman barang di Pulau Jawa bisa di jangkau dengan transportasi ini dengan biaya relatif murah.

2. Identifikasi keinginan, kebutuhan dari tenaga kerja serta tantangan persoalan membatik dikampung batik jetis Sidoarjo

a. Identifikasi *internal* dalam kebutuhan dan keinginan serta tantangan membatik dikampung batik Jetis Sidoarjo.

Dalam *Manpower Planning* (MPP) atau Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses identifikasi dan evaluasi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang akan mengisi jabatan dalam organisasi perusahaan. Kegiatan dalam MPP ini merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi atau perusahaan untuk menjalankan fungsinya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, MPP merupakan salah satu fungsi yang menjadi prioritas setiap bagian di dalam organisasi untuk memenuhi kebutuhan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjalankan fungsi-fungsi lainnya di dalam organisasi. Beberapa identifikasi dalam ketenagakerjaan batik tulis Jetis untuk mendukung kelestarian UKM adalah sebagai berikut :

1. `Lokasi atau tempat dan sarana bagi tenaga kerja pembatik maupun bagi para pengrajin batik tulis Jetis Sidoarjo.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih kesulitan dalam hal perbaikan infakstruktur bagi para pengrajin. Kawasan industri batik tulis Jetis Sidoarjo kurang maksimalnya lokasi yang disediakan masih banyak keluhan dari tenaga kerja pembatik maupun pemilik showroomnya.

Gambar 9

Lokasi Kampung batik yang belum adanya kesiapan dalam daerah pariwisata.

Sumber: dokumentasi saat wawancara

Gambar di atas nampak kondisi jalan cukup bagus, namun lebar jalan tidak terlalu memadai bagi kendaraan roda empat. Jalan di kampung ini tidak cukup lebar untuk lalu lalang mobil, apalagi tempat pengrajin batik kebanyakan berada di gang-gang minor yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki, roda dua atau becak. Kondisi ini sebenarnya tidak menjadi kendala apabila didukung fasilitas pakir kendaraan yang representatif. Fasilitas pakir ini menjadi kendala utama bagi pengembangan kampung batik Jetis, karena pengunjung tidak tahu kendaraannya hendak dipakir dimana sehingga membuat pengunjung kembali parkir dipinggir jalan sehingga mengganggu aktifitas jalan.

Sementara ini para tenaga kerja menginginkan tempat/ lokasi Batik tulis ini tetap berjalan terus menerus dan ramai pengunjung. Di karenakan membatik adalah mata pencairian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dimana lokasi juga menjadi permasalahan dari pengunjung yang sering sekali mengatakan pada tenaga kerja membatik. Seperti hal yang di katakan oleh ibu Kina karyawati *showroom* Amir yaitu

"Ya lokasi Jetis ini sudah strategis sudah dipusat kota, mungkin Cuma kurangnya lahan pakir dan fasilitas lain yang di sediakan oleh pemerintah sehingga kebayakan pengunjung malas untuk datang, menjadikan kampung batik ini sepi tanpa adanya pengunjung yang datang seperti dulu awal peresmiannya"(hasil wawancara tanggal 6 januari 2014 pada pukul 10.00 WIB)

2. Anggaran bantuan permodalan bagi pengrajin batik tulis Jetis Sidoarjo

Anggaran bantuan modal yang diberikan pemerintah Kabupaten Sidoarjo lewat dinas yang ditunjuk yaitu dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dalam membantu tenaga kerja UKM batik tulis Jetis sudah sangat maksimal. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk pedulinya terhadap UKM di luncurkan bantuan kredit bunga ringan. Seperti pemaparan Ibu Sri Utami Gantini selaku kasubag perencanaan dan pelaporan Diskoperindag seperti berikut ini :

"Pemerintah dalam memberikan bantuan sudah sangat maksimal dan banyak diantaranya para pengrajin sudah maju dengan sendirinya. Dan kita tidak terus menerus memberikan modal dan pembinaan kepada para pengrajin. Kita lebih mefokuskan kepada usaha mikro kecil menengah lainnya. Dikarenakan Pemerintah ingin menjadikan Jetis menjadi wilayah mandiri." (wawancara pada tanggal 9 Januari 2014 pada pukul 09.00)

Namun kenyataannya banyak para pengrajin yang masih mengeluhkan mengenai kekurangan dana. Hanya sebagian kecil pengrajin dapat tumbuh kembang dengan mandiri tanpa bantuan dari pemerintah, namun masih banyak juga usaha yang masih belum dapat berkembang dengan sendirinya tanpa bantuaan pemerintah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya pengrajin yang tidak ingin untuk berkembang pesat seperti pengrajin lainnya.

3. Motivasi dalam Pemenuhan Kebutuhan

Dalam memenuhi kebutuhan Rata-rata motivasi tenaga kerja pengrajin batik tulis Jetis di Sidoarjo memiliki motivasi yang tinggi. Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan industri di Jawa Timur, dinamika lingkungan usaha yang tinggi cenderung mendorong pengrajin untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga kebutuhan pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya di masa depan. Motivasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk menimbulkan dorongan untuk berbuat atau melakukan tindakan.

Motivasi berusaha merupakan alasan pokok yang mendasari pengrajin untuk berperilaku dan memutuskan untuk tetap bertahan melakukan kegiatan usaha di bidang kerajinan. Agar dapat mengembangkan usahanya, seyogyanya seorang pengrajin yang juga seorang wirausahawan memiliki motivasi berusaha yang tinggi guna menggerakkan pengrajin untuk memenuhi kebutuhan perkembangan usaha. Motivasi berhubungan dengan kebutuhan, minat (sifat nurani yang timbul dengan sendirinya dan memiliki daya dorong) dan keinginan (sifat hati nurani yang timbul karena orang berminat terhadap sesuatu dan mendorong terbentuknya motif untuk berbuat). Motif yang besar akan timbul manakala ada kebutuhan yang disadari yang menimbulkan keinginan, menimbulkan minat dan menimbulkan motif. Salah satu faktor pendorong yang penting bagi pengrajin dalam berusaha adalah tuntutan memenuhi kebutuhan keluarga.

b. Identifikasi *Ekstern* dalam kebutuhan dan keinginan serta tantangan membatik dikampung batik Jetis Sidoarjo

1. Klinik Layanan Kemasan dan Merek

Klinik ini berfungsi membantu pengusaha industri kecil untuk memperbaiki dan mengembangkan sistim pengemasan produk yang dihasilkan, serta memecahkan masalah kemasan yang dihadapinya. Klinik ini juga membantu pengusaha industri kecil dalam pengembangan merek produk yang dihasilkan, dengan adanya klinik ini diharapkan para pengusaha industri kecil akan lebih terbantu dan teringankan upaya dan bebannya untuk melakukan promosi penjualan produknya dengan penuh percaya diri karena lebih memperoleh citra positif dari segi mutu dan kesan elitis di mata konsumen.

2. Tingkat Komunikasi Para Tenaga kerja pembatik Jetis Sidoarjo.

Tenaga kerja melakukan komunikasi dengan tingkatan yang baik. Suatu kondisi yang potensial untuk memenuhi suatu kebutuhan keinginan dalam suatu tantangan membatik. Karena mereka telah memiliki bekal intensitas komunikasi yang baik. Intensitas komunikasi yang dilakukan pengrajin berhubungan dengan tingkat pendidikannya. Hubungan yang nyata antara komunikasi dengan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan Tenaga kerja, maka semakin tinggi intensitas komunikasinya. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih mampu melakukan komunikasi interpersonal, akses media cetak dan elektronik daripada pengrajin yang tingkat pendidikannya rendah.

Gambar 10

Komunikasi Antar Tenaga Kerja Batik Jetis

Sumber dokumentasi wawancara

Gambar diatas menunjukan bahwa Komunikasi antar tenaga kerja dalam menghadirkan warna serta makna disetiap kain batiknya, oleh karena itu komunikasi diperlukan oleh seseorang demi *terpenuhinya* kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Hampir setiap orang membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain, yang terpenuhi melalui pertukaran pesan yang merupakan jembatan untuk relasi sosial antar manusia. Begitu pula pada pengrajin, tanpa komunikasi pengrajin akan terisolasi dengan dunia di luar dirinya, yang diperlukan untuk kebutuhan usaha dan sosialnya. Bagi pengrajin, berkomunikasi dengan konsumen, pemasok, teman sesama pengrajin, pemberi modal sangat penting untuk keberlangsungan usaha kerajinannya. Pengrajin memiliki kemampuan untuk mengkases media cetak dan elektronik yang masih rendah, akses ini terkait dengan informasi model produk. Seperti halnya yang dikatakan oleh Mas Tono tenaga kerja Al-Huda yaitu :

> "kami disini semua membutuhan komunikasi yang baik satu sama lain agar dapat tersampaikan makna yang terdapat untuk saling mengerti. Pak Huda tidak ada membatasi komunikasi kita semua keluarga jadi tidak ada pembatas antara pemilik *showroom* dengan para tenaga kerjanya" (wawancara 23 Januari pukul 10.00 WIB)

3. Daya Saing

Sebagian besar pengrajin di Sidoarjo memiliki daya saing relatif lebih tinggi. Gambaran aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pada pengrajin serta para tenaga kerja pembatik dalam kualitas kelangsungan usaha. Aspek yang paling menonjol pada faktor daya saing adalah aspek sikap pengrajin memiliki sikap yang cenderung tinggi dalam hal daya saing, namun aspek pengetahuan dan ketrampilan masih rendah. Pengetahuan pengrajin tentang daya saing sangat kondusif untuk keberlanjutan usahanya pada masa mendatang. Seperti halnya yang di katakan oleh Pak Amir pemilik studio batik AMIR:

> "Kami disini semua bersaing secara sehat di karenakan kebanyakan pengusaha disini itu antara lain saudara-saudara sendiri. Kita pun memiliki ciri membatik sendiri-sendiri sasaran pasar pun berbeda satu sama lain. Daya saing usaha memang sulit untuk di tebak persaingan selalu ada. Namun dengan sikap yang baik serta keuletan terhadap membatik akan menutupi tantangan yang di hadapi dalam sebuah persaingan (wawancara 26 Januari pukul 13.00 WIB)

Pengrajin memiliki kiat-kiat menghadapi persaingan secara normatif telah dimiliki sebagian besar pengrajin. Sikap ulet dalam usaha dan bersaing secara etis serta ketertarikan terhadap persaingan relatif tinggi. Pengrajin memiliki ketertarikan terhadap persaingan yang diwujudkan secara sederhana dalam kegiatan usaha keseharian berupa pengamatan terhadap setiap perubahan harga produk kerajinan dan jumlah permintaan/pesanan dari pengrajin lain. Namun ketrampilan mencapai tingginya daya saing masih kurang, pengrajin belum memperhatikan kecenderungan model yang dibutuhkan konsumen, serta kualitas

hasil produksi belum menjadi perhatian pengrajin untuk meningkatkan daya saing usahanya.

3. Strategi Inovatif yang Perlu Dibidik Pemerintah Daerah Sidoarjo Dalam Mendukung Kelestarian UKM Batik Jetis.

a. RENSTRA SKPD

1. Dinas Tenaga Sosial dan Tenaga Kerja

Dalam sebuah rencana strategi yang terdapat pada dinas sosial dan tenaga kerja adanya sebuah arah pembangunan di bidang ketenagakerjaan, trasmigrasi dan kependudukan tahun 2011-2015 meliputi :

a) Penciptaan lapangan kerja di dalam dan diluar negeri melalui pengembangan informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, pengembangan wirausaha mandiri bagi angkatan kerja muda dan pengembangan padat karya produktif.

b) Mengembangan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja.

c) Memperkuat jejaring kerjasama antar pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota dalam penyusunan perencanaan tenga kerja dan pelaksanaan standart pelayanan maksimal di bidang ketenagakerjaan.

d) Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pengawas ketenagakerjaan untuk peningkatan perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja anak serta petugas fungsional ketenagakerjaa lainnya.

e) Pemberian peluang kepada penduduk miskin dan penganggur di wilayah asal (Jawa Timur) dalam memperoleh aset tempat Tinggal, peluang usaha dan kesempatan kerja berkelanjutan

f) Mendorong pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) pada wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Perencanaan strategis dinas tenaga kerja merupakan langka awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu diperlukan integgerasi antar keahlihan SDM dengan sumber daya lainnya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan trasmigrasi diarahkan untuk memberi kontribusi nyata dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

1. Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Dalam sebuah rencana strategi yang terdapat pada dinas sosial dan tenaga kerja adanya sebuah arah pembangunan di bidang ketenagakerjaan, trasmigrasi dan kependudukan tahun 2011-2015 meliputi :

a) Menciptakan wirausaha baru

b) Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri kecil dan dagang kecil.

c) Memberikan peluang usaha bagi industri kecil dan menengah

d) Meningkatnya citra koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh profesional, mandiri sebagai basis ekonomi kerakyatan

e) Meningkatkan akses permodalan bagi koperasi dan UKM

f) Terpenuhinya barang dan jasa dalam jumlah dan harga terjangkau.

g) Meningkatkan pemasaran dan taraf hidup masyarakat industri dan perdagangan dari hasil usahanya.

Potensi industri dan perdagangan di Sidoarjo mempunyai prospek yang baik, hal ini dikarenakan lokasi Sidoarjo sangat potensial dan strategis dalam mendukung kegiatan dunia usaha. Secara sektorat, pesatnya pertumbuhan ekonomi Sidoarjo disumbangkan oleh sektor industri dan perdagangan yang artinya mulai membaiknya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat, hal ini berdampak pada banyaknya pendirian dan perdagangan berpengaruh pada peningkatan Koperasi dan UKM.

b. Program SKPD

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

a) Program pembinaan anak telantar

1. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak telantar

b) Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo

1. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

c) Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial)

1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.

d) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

2. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial.

e) Program peningkatan kesempatan kerja.

1. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.
2. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
3. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
4. Pemberian kesempatan kerja

f) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

1. Fasilitas penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial
2. Sosialisai berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

a) Program penciptaan iklim usaha UMKM yang Kondusif

1. Sosialisasi Kebijakan tentang UMKM

b) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
3. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

c) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalaan
2. Pemantauaan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
3. Penyelenggaraan promosi produk UMKM

d) Program pengembangan industri kecil dan menengah

1. Fasilitas IKM terhadap pemanfaatan SDM

e) Program peningkatan pasar

1. Kegiatan pameran dan promosi produk-produk daerah
2. Kegiatan pasar murah dan fasilitasi operasional

c. Starategis Inovatif dari Peneliti

Dapat dikatakan UKM mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah khususnya Sidoarjo. Pemerintah Sidoarjo telah mengupayakan berbagai produk unggulan yang di kerjakan oleh belasan ribu Usaha Kecil Menengah (UKM) serta puluhan sentra industri kecil menengah tersebar di wilayah “Kota Udang”, julukan khas kota ini. Pada saat ini bisa dibilang bahwa “Sidoarjo kini telah menjadi kota UKM terbesar di Indonesia. Sekitar 17 ribu UKM ada disini. Juga 70 sentra industri kecil menengah, ujar Bupati Sidoarjo H. Saiful ilah, S.H, M.Hum.

Berbagai progam yang telah diberikan untuk dapat melestarikan UKM khususnya Batik Tulis Jetis yang memberikan binaan dan fasilitas agar terus

tumbuh subur. Pembinaan yang diberikan bukan saja berupa bantuan teknis, tetapi juga segi finansial sehingga mereka bisa mendaftarkan jenis usahanya, lalu wawancara dengan pihak bank yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Plafonya tentu berbeda-beda sesuai keperluannya, intinya pemerintah mempermudah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak main-main dengan slogan Sidoarjo sebagai kota UKM. Para pelaku usaha ini juga diikutkan berbagai seminar untuk menambah wawasan sekaligus ide inovasi kreatif. Mereka didorong dan dibawa ke berbagai event pameran, baik wilayah Sidoarjo sendiri maupun kota-kota lainnya di Indonesia.

Setiap kebijakan tentu akan usang jika dibiarkan terus menerus tanpa adanya perubahan atau keinovasian. Inovasi kebijakan tidak harus baru bisa kebijakan lama yang diperbaruhi atau membuat kebijakan baru yang belum sama sekali dilakukan. Begitu pula starategis inovatif yang perlu dibilik pemerintah daerah sidoarjo dalam mendukung kelestarian ukm berbasis produk unggulan. Strategi yang dilakukan ini harus mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dikawasan atau disekitar kawasan tenaga kerja yang berada dikampung batik Jetis dengan metode wawancara yang berisikan pertanyaan mengenai kampung batik dan semua aktivitasnya. Perumusan kedua faktor tersebut dapat digambarkan dalam bentuk matriks SWOT dan strategi yang diperoleh adalah SO, ST, WO dan WT seperti tabel 4 berikut dapat disimpulkan beberapa inovasi dari peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Matriks SWOT dan TOWS

Faktor Faktor internal Faktor-faktor eksternal	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunities)	**Strategi SO** Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang	**Strategi WO** Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Ancaman (Threats)	**Strategi ST** Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	**Strategi WT** Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Dari tabel diatas telah digambarkan mengenai strategi yang dibidik oleh Pemerintah Daerah dalam melestarikan UKM berbasis produk Unggulan batik tulis Sidoarjo khususnya bidang ketenagakerjaan sebagai faktor pendukung tentang adanya pengembagan UKM di daerah yang dapat memberikan sumbangsih kepada daerah. Strategi yang dibidik oleh Pemerintah Daerah maupun SKPD yang bertangguh jawab mengenai UKM dan ketenagakerjaan ini ada 4 seksi dalam bidang tersebut yaitu :

a) Strategi Kerjasama Antar Dinas Tenaga Kerja Dengan Dinas UKM Dalam Pemenuhan Tenaga Kerja Pembatik.

Permasalahan kelangkaan ketenagakerjaan pada sektor informal yakni pada UKM batik tulis Jetis terjadinya ketimpangan pasar produksi yang di tandai dengan banyaknya permintaan pasar terhadap produksi batik, hal ini disebabkan karena sedikitnya pada angkatan kerja untuk dapat bekerja di sektor pengrajin rumah tangga atau UKM. Oleh karena itu kerjasama antar dinas tenaga kerja dengan dinas UKM sangat di butuhkan pada hakekatnya semua kegiatan ekonomi baik skala besar, menengah maupun kecil, formal dan informal mempunyai identitas sektoral. Setiap sektor atau sub sektor mempunyai instansi pembina, oleh karena itu ke dua dinas membuat sebuah regulasi / kebijakan mengenai tenaga kerja UKM.

Dengan demikian kebijakan sektoral menjadi ujung tombak dalam penciptaan kesempatan kerja. Dimana dinas tenaga kerja sebagai penyediaan informasi mengenai lapangan pekerjaan yang sedang dibutuhkan serta memberikan masukan terhadap calon tenaga kerja baru bahwa pekerjaan di sektor UKM memiliki prospek kedepannya dengan baik, oleh karenanya dinas UKM memberikan wadah pelatihan dan tata cara membatik dengan jaminan tenaga kerja pembatik yang bersetifikasi untuk meningkatkan perluasan tenaga kerja. Dengan demikian tangguhjawab setiap instansi melalui kegiatan teknisnya dapat perperan serta dalam menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan.

b) Strategi Pendampingan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Mendorong Kelestarian UKM Batik Tulis Jetis.

Pendampingan dan pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatan ketrampilan, keahlian dan kompentensi tenaga kerja dan produkfitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan memerlukan informasi mengenai jenis keterampilan yang di butuhkan oleh pemberi kerja. Pendampingan membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten di bidang batik.

Pendampingan ini bertujuan mengetahui kekurangan dalam proses pelatihan agar kedepannya dapat berjalan dengan baik. Pelatihan-pelatihan ini memerlukan informasi mengenai jenis ketrampilan yang dibutuhkan. Jenis pelatihan dapat direncanakan lebih baik apabila sistem informasi pasar kerja dapat dibangun. Terbentuknya sistem informasi pasar kerja sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan untuk menyusun kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan daya saing.

c) Strategi Pengembangan Dan Penguatan Sumber Daya Informasi Dalam Mendorong Pembangunan Sektor Industri Dan Perdagangan.

Arus informasi industri dan perdagangan yang lancar dan akurat. Bagi masyarakat informasi telah mendunia pada saat ini merupakan faktor daya saing yang kuat dalam sistem informasi telah mendukung perekonomian. Sistem informasi yang efektif akan meningkatkan nilai

kenomis dan nilai tambah industri serta perdagangan. Harga informasi harus semurah-murahnya agar dapat digayagunakan oleh masyarakat luas, sedangkan arus informasi harus lancar dan cepat ke arah semua jenjang industri dan perdagangan.

Adanya eliminasi disparitas informasi di dalam lingkungan dunia usaha nasional, menghapus struktur ekonomi biaya tinggi dan mengoptimumkan produksi. Transparansi informasi diharapkan terkelola secara aktual, modern, integratif dengan memanfaatkan sistem jaringan, yang mendistribusikan jenis-jenis informasi pasar, produksi, investasi, bahan baku, teknologi dan tenaga kerja.

d) Strategi Pengembangan Lingkungan Bisnis Yang Nyaman Dan Kondusif Melalui Pembinanan Aparatur Serta Sarana Dan Prasana.

Starategi ini mengupayakan terwujudnya peningkatan kinerja aparatur di bidang SDM, sarana dan prasarana, melalui siklus manajemen perencanaan yang teratur perumusan peraturan-peraturan di bidang perkoperasian, industri dan perdagangan serta peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung iklim kerja yang kondusif.

Memperlancar arus barang dan jasa dengan meningkatkan efesiensi distribusi agar dilakukan antara lain dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang membebani distribusi dan meningkatan ketersediaan dan keandalan sarana transportasi dan distribusi.

Dari beberapa strategi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung kelestarian UKM di kabupaten Sidoarjo perlu adanya peran

masyarakat dalam pembangunan industri dan perdagangan, starategi inovatif yang dibilik oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo guna mengembangkan usaha dan permodalan serta memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat Sidoarjo, sehingga UKM mampu bersaing dalam mekanisme pasar dengan para pelaku ekonomi serta dapat mengurangi hambatan yang dihadapi UKM baik secara internal maupun eksternal.

C. Pembahasan

Sesuai dengan urutan analisis data yang dikemukakan oleh *Spradley*, dimana pada langkah sebelumnya analisis domain dan analisis taksonomi telah digunakan pada pengumpulan dan penyajian data, analisis dan interpretasi data di dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui dua langkah yaitu analisis komponensial dan analisis tema kultural. Analisis komponensial adalah analisis yang digunakan untuk mengkontraskan masing-masing komponen yang diperoleh pada tiap domain. Semua komponen-komponen dalam setiap domain tersebut diperoleh dari hasil analisis taksonomi. Dengan mengkontraskan masing-masing komponen maka akan diketahui perbedaan dan persamaan antar komponen sehingga tercipta hubungan antar komponen dalam setiap domain.

Analisis data yang selanjutnya adalah analisis tema kultural yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar domain yang satu dengan dengan domain yang lain. Nantinya akan diproleh pengertian yang menyeluruh mengenai inti permasalahan yang sedang diteliti yaitu inovasi ketenaga kerjaan dalam mendukung kelestarian UKM di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu melalui analisis

tema kultural akan ditemukan budaya yang terkandung di dalam kelestarian UKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada bagan peta analisis berikut ini:

Gambar 11
Peta Analisis Mengacu Pada Teori
Spradley

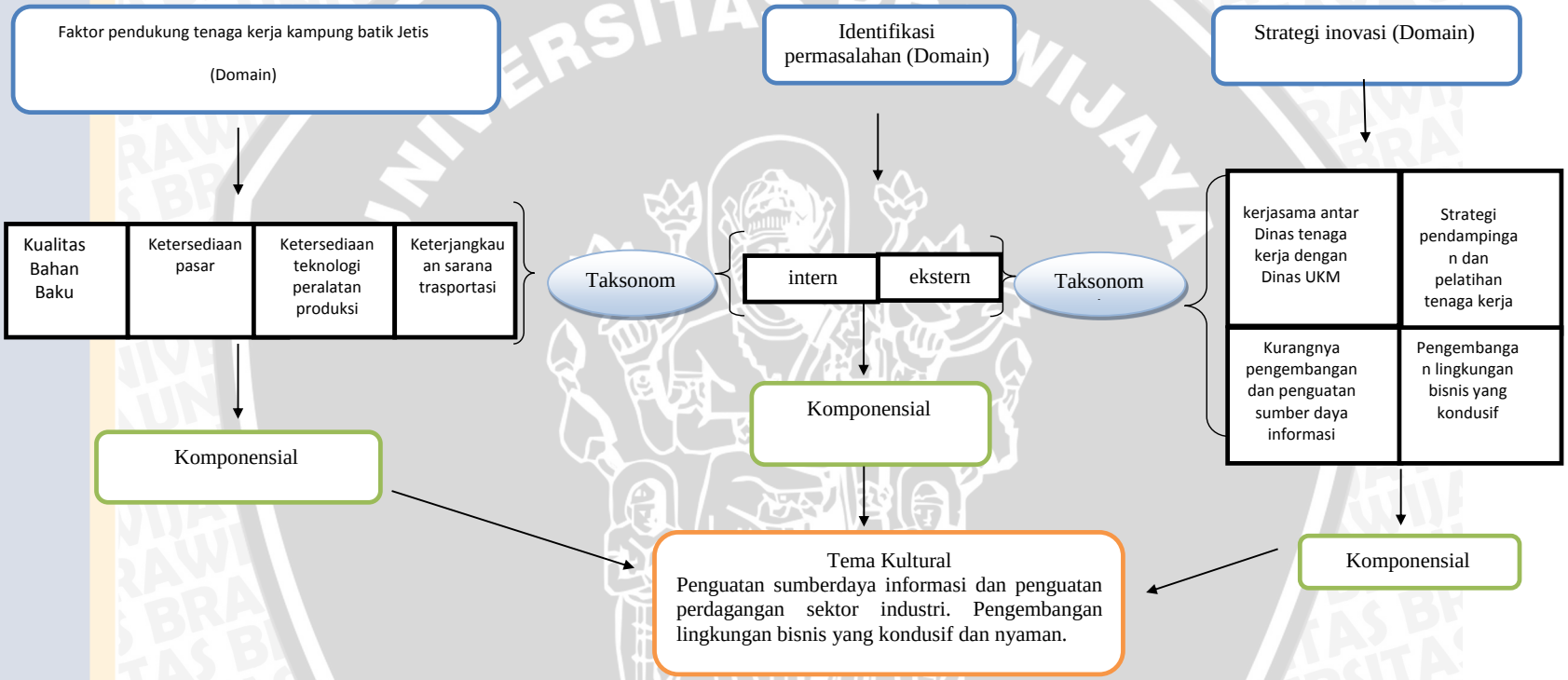

1. Kondisi Tenaga Kerja yang berada dikampung batik Jetis Sidoarjo

Kebijakan Publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan (Nugroho, 2003:55). Sedangkan Anderson yang dikutip oleh Islamy (2001:19), menyatakan bahwa kebijakan publik ialah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Dari arti mengenai kebijakan publik yang dikutip oleh Islamy di atas, selanjutnya Islamy (2001:20) menyimpulkan, bahwa kebijakan publik (*publik policy*) adalah tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.Pada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdi pada kepentingan masyarakat.

Kaitanya dengan kondisi tenaga kerja dalam mendukung kelestarian UKM di kampung batik tulis Jetis Sidoarjo adalah ini merupakan bentuk kebijakan atau program dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bertugas untuk mengembangkan UKM khususnya dalam hal ini adalah tenaga kerja di kampung batik tulis Jetis. Pengembangan kelestarian UKM batik tulis Jetis dilaksanakan melalui dinas yang ditunjuk untuk mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis di Kabupaten Sidoarjo yaitu dinas koperasi perindustrian, perdagangan dan ESDM.

Kelestarian UKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini merupakan kebijakan yang berisikan pengaturan dan pembinaan yang diberikan pemerintah Kabupaten

Sidoarjo kepada tenaga kerja pembatik di kampung batik tulis Jetis. Dalam kondisi mengenai tenaga kerja pada kelestarian UKM batuk tulis Jetis di Kabupaten Sidoarjo terdapat 2 aspek yang ada didalamnya yaitu a) Gambaran umum tenaga kerja di kampung batik Jetis b) Faktor pendukung tenaga kerja kampung batik jetis di Kabupaten Sidoarjo.

a. Gambaran umum tenaga kerja di kampung batik Jetis

Tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Simanjuntak 1998:2). Sedangkan pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tenaga kerja Pengertian mengenai pekerja/buruh ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula pekerja/buruh yang menerima imbalan dalam bentuk barang.

Jika kita melihat pengertian dari tenaga kerja di atas terdapat Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya adalah penduduk (Sumber Daya Manusia), yang dimaksud dengan penduduk dalam sumber daya manusia adalah penduduk dalam usia kerja. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi, hanya penduduk usia kerja dalam arti sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja meliputi

golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan-golongan lain atau penerima pendapatan yaitu mereka yang menerima pensiunan, tingkat bunga atas simpanan hal ini merupakan faktor tenaga kerja dalam produksi sehingga kegiatan produksi diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan kemampuan tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penduduk dalam suatu wilayah yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas perusahaan. .

Hal ini dapat diliat pada gambaran tenaga kerja pembatik tulis Jetis di Kabupaten Sidoarjo yang rata-rata mereka membatik dari turun temurun di kampung batik tulis Jetis, Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi perindustrian, perdagangan dan ESDM dapat diketahui jumlah tenaga kerja

Dengan memiliki modal dan ketrampilan yang matang, mereka membatik dengan penuh kesabaran dan ketelatenan menghadirkan warna dan makna di setiap coretan gambarnya di kain. Jenis barang produksi berbagai macam sesuai dengan pemilik *showroom* tempat mereka pekerja. Mayoritas tenaga kerja di Kampung batik tulis Jetis Sidoarjo memiliki cara tersendiri dalam perwarnaan dan motif di setiap kain batiknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

b. Faktor Pendukung Tenaga Kerja Kampung Batik Jetis Sidoarjo

Tenaga kerja merupakan suatu faktor produksi sehingga dalam kegiatan produksi diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan kemampuan tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penduduk dalam suatu wilayah yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas perusahaan.

Sedangkan Winardi (1992:56) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tenaga kerja adalah Produktivitas tenaga kerja hingga tingkat tertentu dipengaruhi oleh tenaga kerja keturunan, dari mana dia berasal dan iklim lingkungan yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Sifat-sifat kesehatan, kekuatan, intelegensi, ambisi, kemampuan untuk menilai, ketekunan, mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Kondisi tempat kerja. Tergantung kualitas dan metode dari organisasi perusahaan. Berkaitan dengan upah yang diterimanya. Berdasarkan pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung tenaga kerja adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau individu maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam meningkatkan taraf usaha.

Kaitanya dengan mengembangkan UKM batik tulis dengan tenaga kerja pembatik adalah faktor pendukung tenaga kerja dalam kelangsungan usaha batik menuntut peran sumberdaya manusia yang handal dalam

fungsinya masing·masing, termasuk tenaga kerja perajin batiknya. Pengembangan UKM khususnya pada batik tulis yang dilakuakan oleh Pemerintah daerah Sidoarjo untuk memberikan kepastian usaha, perlindungan serta mengembangkan usaha batik tulis yang tertib, aman, selaras, dan serasi serta seimbang dengan lingkungannya. Tujuan dari mengembangkan faktor pendukung dari tenaga kerja pembatik yaitu mewujudkan UKM sebagai usaha kecil yang berhak mendapat perlindungan dan pembinaan, sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai peruntukannya dengan kriteria yang ditetapkan dan mengembangkan ekonomi sektor informal. Faktor pendukung tenaga kerja kampung batik Jetis tersebut terdapat beberapa hal seperti :

1. Kualitas Bahan Baku

Rata-rata faktor ketersediaan bahan baku dikampung batik jetis cukup memenuhi permintaan konsumen. Ketersediaan bahan baku di Kabupaten Sidoarjo sangat mutlak diperlukan untuk menghasilkan produk kerajinan bermutu. Pengrajin di Kabupaten Sidoarjo mengeluh jika mendapatkan bahan baku yang jelek tidak sesuai kebutuhan. Tidak kesesuaian bahan baku bagi pengrajin akan semakin susah untuk memenuhi permintaan dan proses produksi menjadi terlambat dari jadwal dan biaya produksi meningkat dua kali lipat.

2. Ketersediaan Pasar

Faktor ketersediaan pasar bagi pengrajin masih terbatas berkisar regional jawa timur meski kini permintaan pasar cukup tinggi dan memulai

pesanan dari luar jawa. Jangkauan pemasaran produk kerajinan masih belum optimal. Namun ketersediaan pasar di Sidoarjo relatif tinggi karena konsumen lebih mudah menjangkau produk dengan mendatangi lokasi sentra kerajinan batik tulis Sidoarjo.

3. Ketersediaan Teknologi Peralatan Produksi

Ketersediaan sarana teknologi penunjang proses produksi batik tulis Jetis Sidoarjo masih relatif sederhana dan hampir dari setengah pengrajin batik tulis Jetis di Sidoarjo masih menggunakan peratan teknologi produksi yang sederhana. Para pengrajin batik tulis Jetis dengan peralatan yang jarang di perbaharui, pengrajin kurang mempertimbangkan aspek penyusutan peralatan terutama acuan ukuran kualitas batik tulis Jetis dan produk yang dihasilkan.

4. Keterjangkauan Sarana Transportasi

Keterjangkauan sarana transportasi untuk kegiatan usaha kerajinan berbeda-beda disetiap pemilik *showroom* batik tulis jetis. Tenaga kerja pembatik dan pemilik *showroom* Pengrajin di Sidoarjo mengalami hambatan dalam biaya transportasi yang semakin meningkat, kenaikan harga bahan bakar minyak dirasakan amat memberatkan dalam melakukan pengiriman ke luar daerah.

2. Identifikasi keinginan, kebutuhan dari tenaga kerja serta tantangan persoalan membatik dikampung batik jetis Sidoarjo

Pentingnya perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau *Manpower Planning* di dalam perusahaan. Dari perspektif organisasi, faktor manusia

merupakan satu-satunya faktor yang harus dinilai sebagai aset paling utama di dalam perusahaan. Namun demikian, belum semua perusahaan menerapkan kebijakan mengenai pentingnya melakukan penyusunan kebutuhan tenaga kerja. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa hal, misalnya saja kebijakan perusahaan yang belum baku, kebutuhan tenaga kerja selama ini dianggap masih memadai sehingga tidak diperlukan perencanaan tenaga kerja, program pengembangan perusahaan belum mempertimbangkan faktor manusia sebagai faktor yang strategis, dan masih banyak faktor lainnya yang tentu akan sangat beragam di masing-masing perusahaan.

Manpower Planning (MPP) atau Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses identifikasi dan evaluasi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang akan mengisi jabatan dalam organisasi perusahaan. Kegiatan dalam MPP ini merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi atau perusahaan untuk menjalankan fungsinya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan.

Penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja pada setiap bagian harus didasarkan pada pertimbangan bahwa struktur organisasi dan *content* dari setiap *job* telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan standar struktur organisasi yang berlaku. Dengan adanya struktur organisasi yang telah sesuai dengan standar didasarkan pada aktivitas organisasi yang bersangkutan dan diarahkan kepada visi, misi, dan tujuan, maka rencana kebutuhan tenaga kerja diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik dan

seimbang antara kualitas dan kuantitasnya untuk bahasan mengenai struktur organisasi.

Dari sini dapat dilihat bahwa *Man Power Planning* (MPP) digunakan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan terhadap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sidoarjo contohnya seperti berikut ini :

a. Identifikasi internal dalam kebutuhan dan keinginan serta tantangan membatik di kampung batik Jetis Sidoarjo.

1. Lokasi atau tempat dan sarana bagi tenaga kerja pembatik maupun bagi para pengrajin.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih kesulitan dalam hal perbaikan infakstruktur bagi para pengrajin. Kawasan industri batik tulis Jetis Sidoarjo kurang maksimalnya lokasi yang disediakan masih banyak keluhan dari tenaga kerja pembatik maupun pemilik showroomnya. Para tenaga kerja menginginkan tempat/lokasi batik tetap ramai dikunjungi oleh para pengunjung.

2. Anggaran bantuan permodalan bagi pengrajin batik tulis Jetis.

Anggaran bantuan modal yang diberikan pemerintah Kabupaten Sidoarjo lewat dinas yang ditunjuk yaitu dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dalam membantu tenaga kerja batik tulis Jetis. Hal itu bisa dilihat dari bantuan permodalan pada kredit bunga ringan yang diberikan pada seluruh UKM di Sidoarjo khususnya batik tulis Jetis. Sedikitnya informasi yang

diketahui tidak mencangkup semua kalangan tenaga kerja yang nantinya ditakutkan terjadi kecemburuan sosial.

3. Motivasi dalam Pemenuhan Kebutuhan

Dalam memenuhi kebutuhan Rata-rata motivasi tenaga kerja pengrajin batik tulis Jetis di Sidoarjo memiliki motivasi yang tinggi. Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan industri di Jawa Timur, dinamika lingkungan usaha yang tinggi cenderung mendorong pengrajin untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga kebutuhan pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya di masa depan. Motivasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk menimbulkan dorongan untuk berbuat atau melakukan tindakan. Motivasi berusaha merupakan alasan pokok yang mendasari pengrajin untuk berperilaku dan memutuskan untuk tetap bertahan melakukan kegiatan usaha di bidang kerajinan.

b. Identifikasi *Ekstern* dalam kebutuhan dan keinginan serta tantangan membatik dikampung batik Jetis Sidoarjo

1. Klinik Layanan Kemasan dan Merek

Klinik ini berfungsi membantu pengusaha industri kecil untuk memperbaiki dan mengembangkan sistim pengemasan produk yang dihasilkan, serta memecahkan masalah kemasan yang dihadapinya. Klinik ini juga membantu pengusaha industri kecil dalam pengembangan merek produk yang dihasilkan, dengan adanya klinik ini diharapkan para pengusaha industri kecil akan lebih terbantu dan teringankan upaya dan

bebannya untuk melakukan promosi penjualan produknya dengan penuh percaya diri karena lebih memperoleh citra positif dari segi mutu dan kesan elitis di mata konsumen.

2. Tingkat Komunikasi Para Tenaga kerja pembatik Jetis Sidoarjo**.**

Tenaga kerja melakukan komunikasi dengan tingkatan yang baik. Suatu kondisi yang potensial untuk memenuhi suatu kebutuhan keinginan dalam suatu tantangan membatik. Karena mereka telah memiliki bekal intensitas komunikasi yang baik. Intensitas komunikasi yang dilakukan pengrajin berhubungan dengan tingkat pendidikannya. Hubungan yang nyata antara komunikasi dengan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan Tenaga kerja, maka semakin tinggi intensitas komunikasinya. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih mampu melakukan komunikasi interpersonal, akses media cetak dan elektronik daripada pengrajin yang tingkat pendidikannya rendah.

Komunikasi diperlukan oleh seseorang demi terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Hampir setiap orang membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain, yang terpenuhi melalui pertukaran pesan yang merupakan jembatan untuk relasi sosial antar manusia. Begitu pula pada pengrajin, tanpa komunikasi pengrajin akan terisolasi dengan dunia di luar dirinya, yang diperlukan untuk kebutuhan usaha dan sosialnya.

3. Daya Saing

Sebagian besar pengrajin di Sidoarjo memiliki daya saing relatif lebih tinggi. Gambaran aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pada pengrajin serta para tenaga kerja pembatik dalam kualitas kelangsungan usaha. Aspek yang paling menonjol pada faktor daya saing adalah aspek sikap pengrajin memiliki sikap yang cenderung tinggi dalam hal daya saing, namun aspek pengetahuan dan ketrampilan masih rendah. Pengetahuan pengrajin tentang daya saing sangat kondusif untuk keberlanjutan usahanya pada masa mendatang. Pengrajin memiliki kiat-kiat menghadapi persaingan secara normatif telah dimiliki sebagian besar pengrajin. Sikap ulet dalam usaha dan bersaing secara etis serta ketertarikan terhadap persaingan relatif tinggi. Pengrajin memiliki ketertarikan terhadap persaingan yang diwujudkan secara sederhana dalam kegiatan usaha keseharian berupa pengamatan terhadap setiap perubahan harga produk kerajinan dan jumlah permintaan/pesanan dari pengrajin lain. Namun ketrampilan mencapai tingginya daya saing masih kurang, pengrajin belum memperhatikan kecenderungan model yang dibutuhkan konsumen, serta kualitas hasil produksi belum menjadi perhatian pengrajin untuk meningkatkan daya saing usahanya.

3. Strategi Inovatif Yang Perlu Dibidik Pemerintah Daerah Sidoarjo Dalam Mendukung Kelestarian UKM Batik Jetis.

Identifikasi faktor internal dan eksternal yang dirumuskan dalam upaya strategi inovatif kelestarian UKM batik Jetis yang perlu dibidik pemerintah daerah Sidoarjo dapat dilihat sebagai berikut :

1) Analisis Faktor Internal

a) Kekuatan *(Strength)*

i. Kondisi yang sangat strategis

ii. Batik yang dihasilkan berkualitas

iii. Harga bersaing

b) Kelemahan *(Weaknesses)*

i. Kurangnya kerja sama antara pemerintah daerah.

ii. Kurangnya pengawasan proses produksi dan kualitas

iii. Manajemen persediaan bahan baku belum teratur

iv. Lahan kerja kurang luas dan kurang nyaman

2) Analisis Lingkungan Eksternal

a) Peluang *(Opportunity)*

i. Mempunyai letak wilayah yang strategis untuk bisa dijangkau antar wilayah satu dengan wilayah yang lain

ii. Memiliki sistem pemasaran terpusat

iii. Mempunyai banyak relasi

b) Ancaman *(Threats)*

i. Sumberdaya manusia yang belum optimal

ii. Kurang sadarnya masyarakat adanya pariwisata

iii. Terjadinya persaingan antar pengrajin

Tabel 5
Matriks SWOT dan TOWS Strategi Inovatif Ketenagakerjaan Dalam mendukung Kelestarian UKM

Internal / Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	-Kondisi yang sangat strategis -Batik yang dihasilkan berkualitas -Harga bersaing	-Kurangnya kerja sama antara pemerintah daerah. -Kurangnya pengawasan proses produksi dan kualitas -Manajemen persediaan bahan baku belum teratur -Lahan kerja kurang luas dan kurang nyaman
Peluang (O)	S+O	W+O
-Mempunyai letak wilayah yang strategis untuk bisa dijangkau antar wilayah satu dengan wilayah yang lain -Memiliki sistem pemasaran terpusat -Mempunyai banyak	-Pemerintah dapat membantu para pengrajin batik Jetis dengan memfasilitasi jalur distribusi yang baru -pemfaatan website atau email sebagai sarana promosi	-Pemerintah memfasilitasi para pengrajin serta tenaga kerja pembatik dengan pengadaan pelatihan, tentang manajemen keuangan, manajemen bisnis dan manajemen persediaan.

relasi	(pengembangan E-Commerce) -Optimalisasi pemasaran -Memperluas jaringan relasi pemasaran	-Mengalokasikan dana untuk meningkatkan teknologi produksi yang dipergunakan - Memberikan bantuan pengembangan teknologi produksi
Ancaman (T)	S+T	W+T
- Sumberdaya manusia yang belum optimal - Kurang sadarnya masyarakat adanya pariwisata - Terjadinya persaingan antar pengrajin	- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasaran yang memadai seperti, akses pakir, pembenahan fasilitas umum, serta optimalisasi koperasi sehingga mampu menyediakan bahan baku.	- Meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dan wisatawan/pengunjung dalam menjaga dan melestarikan wisata budaya.

Perlunya menjawab adanya inovasi, dimana kebijakan yang dibuat cenderung usang hal ini di sebabkan karena adanya perubahan dinamika yang berbeda, jika hal itu di ulang-ulang tidak dapat menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu sesuai dengan perubahan dinamika masyarakat dan untuk mengatasi ke usangan maka di perlukan sebuah inovasi-inovasi kebijakan. Harapan dari inovasi ini terjadi sebuah perubahan kebijakan dan terjadi perubahan strategi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Myres dan Marquis (2003:28), merumuskan strategi inovasi itu

sebagai aktifitas konseptualisasi, serta ide menyelesaikan masalah dengan membawa nilai ekonomis bagi perusahaan dan nilai sosial bagi masyarakat. Begitu pula strategi inovatif dalam mendukung kelestarian UKM di Kabupaten Sidoarjo. Ketika suatu perusahaan mampu mempertahankan keuntungan yang melebihi dari rata-rata keuntungan dalam suatu industri maka perusahaan tersebut sudah dapat dikatakan sudah mencapai *competitive advantage* dari para kompetitornya. Sehingga strategi yang dilakukan ini harus mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dikawasan atau disekitar kawasan tenaga kerja yang berada dikampung batik Jetis dengan metode wawancara yang berisikan pertanyaan mengenai kampung batik dan semua aktivitasnya dapat disimpulkan beberapa inovasi dari peneliti adalah sebagai berikut :

a. Strategi Kerjasama Antar Dinas Tenaga Kerja Dengan Dinas UKM Dalam Pemenuhan Tenaga Kerja Pembatik.

   Permasalahan kelangkaan ketenagakerjaan pada sektor informal yakni pada UKM batik tulis Jetis terjadinya ketimpangan pasar produksi yang di tandai dengan banyaknya permintaan pasar terhadap produksi batik, hal ini disebabkan karena sedikitnya pada angkatan kerja untuk dapat bekerja di sektor pengrajin rumah tangga atau biasa disebut UKM. Oleh karena itu kerjasama antar dinas tenaga kerja dengan dinas UKM sangat di butuhkan pada hakekatnya semua kegiatan ekonomi baik skala besar, menengah maupun kecil, formal dan informal mempunyai

identitas sektoral. Setiap sektor atau sub sektor mempunyai instansi pembinaan.

Dengan demikian kebijakan sektoral menjadi ujung tombak dalam penciptaan kesempatan kerja. Dimana dinas tenaga kerja sebagai penyediaan informasi mengenai lapangan pekerjaan yang sedang dibutuhkan serta memberikan masukan terhadap calon tenaga kerja baru bahwa pekerjaan di sektor UKM memiliki prospek kedepannya dengan baik, oleh karenanya dinas UKM memberikan wadah pelatihan dan tata cara membatik dengan jaminan tenaga kerja pembatik yang bersetifikasi untuk meningkatkan perluasan tenaga kerja.

b. Strategi Pendampingan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Mendorong Kelestarian UKM Batik Tulis Jetis.

Pendampingan dan pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatan ketrampilan, keahlian dan kompentensi tenaga kerja dan produkfitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan memerlukan informasi mengenai jenis keterampilan yang di butuhkan oleh pemberi kerja. Pendampingan membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten di bidang batik. Pendampingan ini bertujuan mengetahui kekurangan dalam proses pelatihan agar kedepannya dapat berjalan dengan baik. Pelatihan-pelatihan ini memerlukan informasi mengenai jenis ketrampilan yang dibutuhkan.

Jenis pelatihan dapat direncanakan lebih baik apabila sistem informasi pasar kerja dapat dibangun.

c. Strategi Pengembangan Dan Penguatan Sumber Daya Informasi Dalam Mendorong Pembangunan Sektor Industri Dan Perdagangan.

Arus informasi industri dan perdagangan yang lancar dan akurat. Bagi masyarakat informasi telah mendunia pada saat ini merupakan faktor daya saing yang kuat dalam sistem informasi telah mendukung perekonomian. Sistem informasi yang efektif akan meningkatkan nilai enkomis dan nilai tambah industri serta perdagangan. Harga informasi harus semurah-murahnya agar dapat digayagunakan oleh masyarakat luas, sedangkan arus informasi harus lancar dan cepat ke arah semua jenjang industri dan perdagangan. Transparansi informasi diharapkan terkelola secara aktual, modern, integratif dengan memanfaatkan sistem jaringan, yang mendistribusikan jenis-jenis informasi pasar, produksi, investasi, bahan baku, teknologi dan tenaga kerja.

d. Strategi Pengembangan Lingkungan Bisnis Yang Nyaman Dan Kondusif, Melalui Pembinanan Aparatur Serta Sarana Dan Prasana.

Starategi ini mengupayakan terwujudnya peningkatan kinerja aparatur di bidang SDM, sarana dan prasarana, melalui siklus manajemen perencanaan yang teratur perumusan peraturan-peraturan mengenai tenaga kerja yang berada pada sektor industri rumah tangga dan perdagangan serta peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung iklim kerja yang kondusif. Memperlancar arus barang dan

jasa dengan meningkatkan efesiensi distribusi agar dilakukan antara lain dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang membebani distribusi dan meningkatan ketersediaan dan keandalan sarana transportasi dan distribusi.

Dari beberapa strategi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung kelestarian UKM di kabupaten Sidoarjo perlu adanya peran masyarakat dalam pembangunan industri dan perdagangan, starategi inovatif yang dibilik oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo guna mengembangkan usaha dan permodalan serta memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat Sidoarjo, sehingga UKM mampu bersaing dalam mekanisme pasar dengan para pelaku ekonomi serta dapat mengurangi hambatan yang dihadapi UKM baik secara internal maupun eksternal.

Beberapa strategi di atas jika dihubungkan dengan teori yang dipaparkan oleh *Myres* dan *Marquis* (2003:28), merumuskan strategi inovasi itu sebagai aktifitas konseptualisasi, serta ide menyelesaikan masalah dengan membawa nilai ekonomis bagi perusahaan dan nilai sosial bagi masyarakat oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa strategi di atas merupakan penilaian yang terjadi pada mengembangkan UKM khususnya dalam hal ini adalah tenaga kerja di kampung batik tulis Jetis. Dalam kenyataannya pengembangan UKM pada sektor tenaga kerja di kampung batik Jetis masih perlu banyak pembenahan dalam pelaksanaannya hal tersebut bisa dilihat dari Minimnya penataan kelembagaan industrilisasi oleh pemerintah Kabupaten, kurangnya

pengembangan dan penguatan sumber daya informasi yang dapat di akses oleh para pengrajin.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang ada di atas tentang pengembangan UKM pada tenaga kerja pembatiknya di Kampung batik Jetis Sidoarjo yang dapat dilihat diatas belum adanya kerjasama di dinas ukm maupun dinas tenaga kerja guna memperkerjaan pembatik pada masyarakat Sidoarjo. Hal tersebut dikarenakan masih banyak terdapat keinginan, kebutuhan serta tantangan terjadi didalamnya. Keinginan, serta kebutuhan dari tenaga kerja pembatik tulis Jetis yang berupa lokasi atau tempat dan sarana, minimnya atau kurangnya bantuan modal yang diberikan, motivasi dalam Pemenuhan Kebutuhan, Klinik Layanan Kemasan dan Merek, serta tantangan daya saing usaha, teknik membatik. Kebutuhan maupun tantangan yang dihadapi para tenaga kerja pembatik tersebut yang mendukung kelestarian UKM batik tulis di Kabupaten Sidoarjo berjalan kurang maksimal. Sehingga perlunya adanya sebuah Inovasi kebijakan untuk memperbaiki atau membenahi kebijakan atau program penataan dan pembinaan tenaga kerja batik sehingga bisa menjadi lebih baik pada tahap penataan dan pembinaan pada tahap tahap berikutnya.

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN

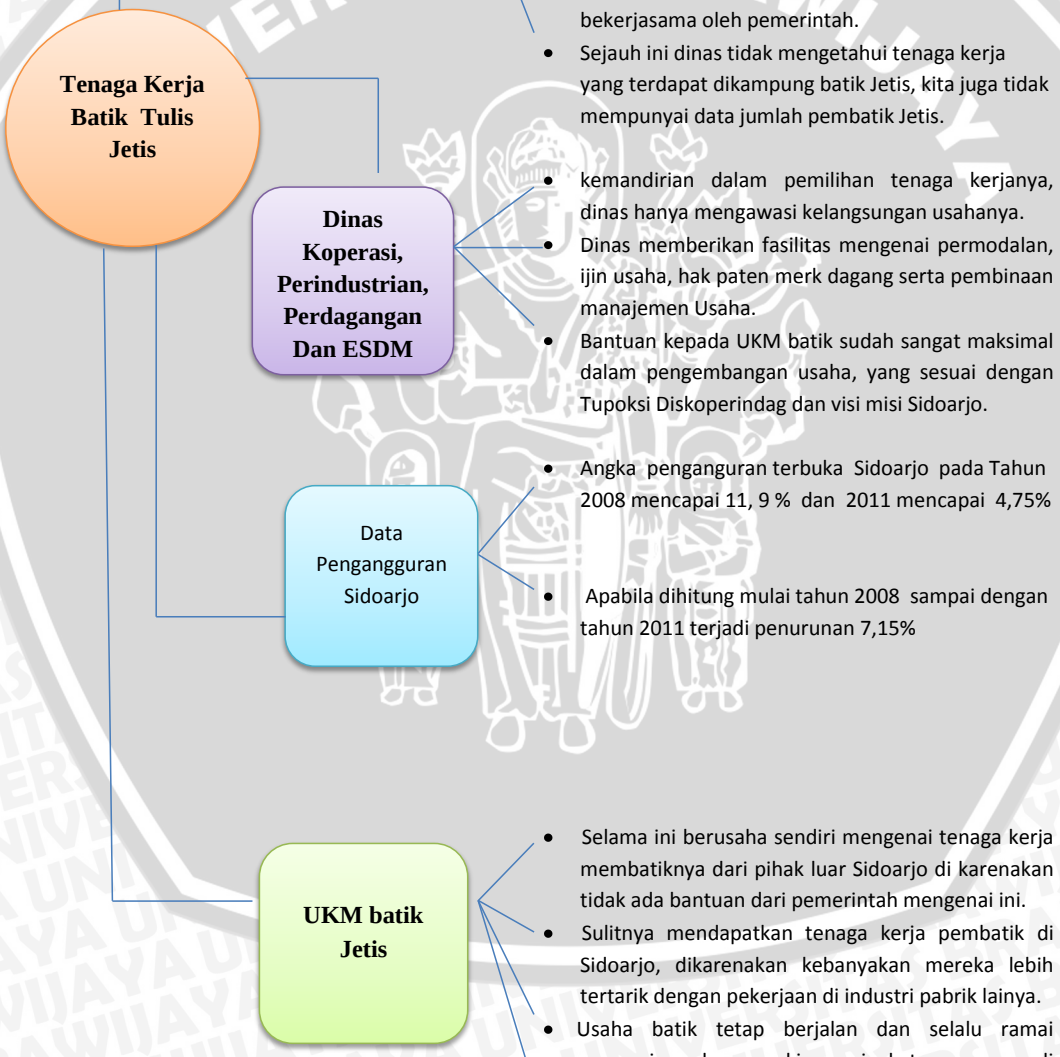

STRATEGI INOVATIF PENELITIAN

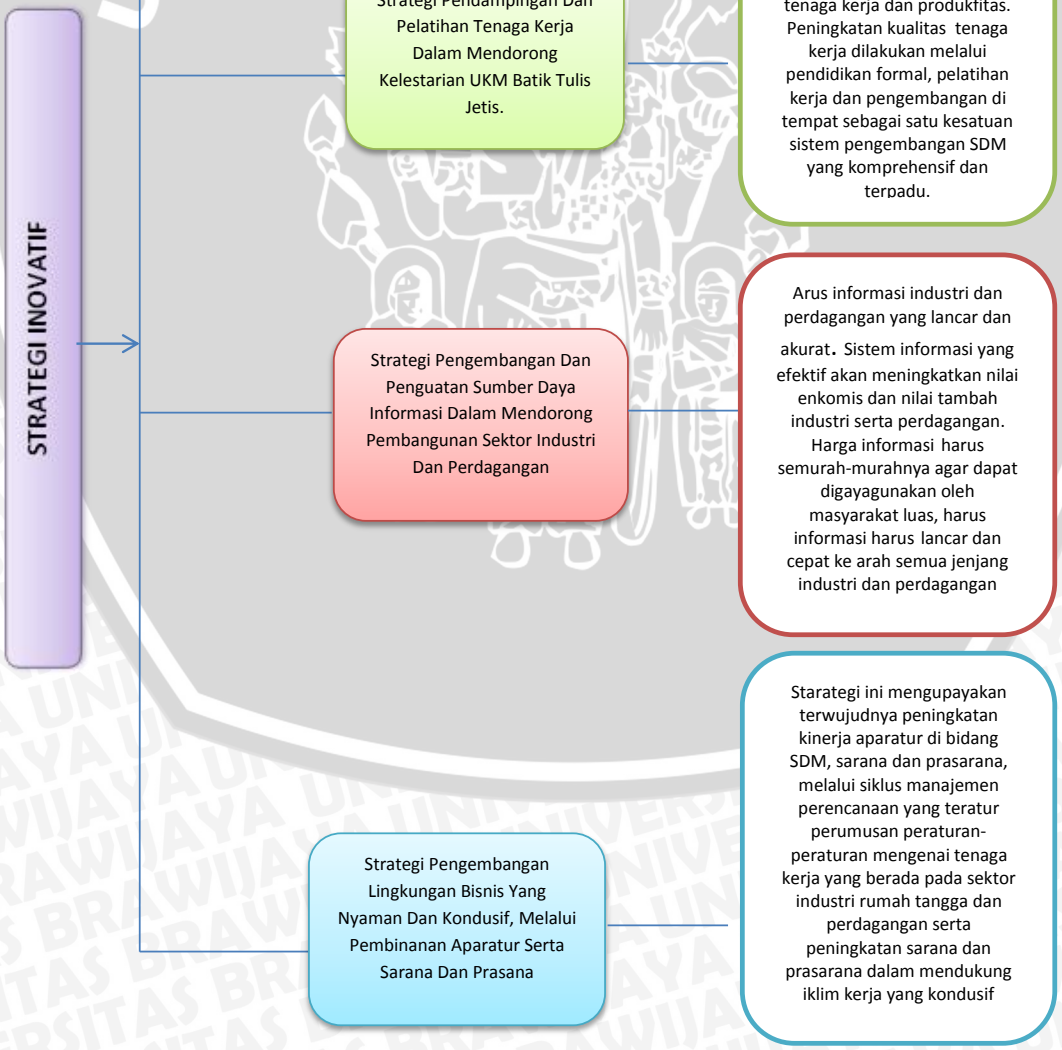

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembangan UKM batik tulis dalam aspek tenaga kerja yang menjadi faktor penting dalam perkembangannya. Para pengrajin batik Jetis sebagian sudah memiliki pengetahuan tentang ketrampilan membatik secara turun menurun. Para pembatik banyak yang berusia lanjut, karena pekerjaan membatik kurang diminati oleh generasi muda tak sedikit para pengrajin harus mendatangkan pekerja dari luar Sidoarjo seperti halnya pengrajin dari Pekalongan, Trenggalek, Tulung Agung. Kondisi ini cukup memprihatikan karena seharusnya industri batik Jetis sangat potensial untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. faktor pendukung tenga kerja pembatik dari segi kualitas bahan baku, tersedian pasar, ketersediaan teknologi peralatan produksi maupun keterjangkauan trasportasi demi kelangsungan usaha serta keinginan kebutuhan tenaga kerja membatik dalam minimnya atau kurangnya dana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. Hal lain yang mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis ini adalah kurangnya lahan untuk meningkatkan sentra batik tulis Jetis sebagai wisata dan tingkat komunikasi para tenaga kerja batik Jetis. Selain tingkat komunikasi para tenaga kerja batik Jetis yang dibutuhkan.

2. Strategi Inovasi yang dibilik oleh pemerintah daerah Sidoarjo dalam mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis berupa inovasi dari tahap a). Strategi kerjasama antar Dinas tenaga kerja dengan Dinas UKM dalam pemenuhan tenaga kerja pembatik. Permasalahan kelangkaan ketenagakerjaan pada sektor informal yakni pada UKM batik tulis Jetis terjadinya ketimpangan pasar produksi yang di tandai dengan banyaknya permintaan pasar terhadap produksi batik. Dimana dinas tenaga kerja sebagai penyediaan informasi mengenai lapangan pekerjaan yang sedang dibutuhkan serta memberikan masukan terhadap calon tenaga kerja baru bahwa pekerjaan di sektor UKM memiliki prospek kedepannya dengan baik, oleh karenanya dinas UKM memberikan wadah pelatihan jaminan tenaga kerja pembatik yang bersetifikasi. b) Strategi pendampingan dan pelatihan tenaga kerja dalam mendorong kelestarian UKM batik tulis Jetis. Pendampingan dan pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatan ketrampilan, keahlian dan kompentensi tenaga kerja dan produkfitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan memerlukan informasi mengenai jenis keterampilan yang di butuhkan oleh pemberi kerja c) Strategi Pengembangan Dan Penguatan Sumber Daya Informasi Dalam Mendorong Pembangunan Sektor Industri Dan Perdagangan informasi industri dan perdagangan yang lancar dan akurat. Bagi masyarakat informasi telah mendunia pada

saat ini merupakan faktor daya saing yang kuat dalam sistem informasi telah mendukung perekonomian.d). Strategi Pengembangan Lingkungan Bisnis Yang Nyaman Dan Kondusif , melalui Pembinanan Aparatur Serta Sarana Dan Prasana. terwujudnya peningkatan kinerja aparatur di bidang SDM, sarana dan prasarana, melalui siklus manajemen perencanaan yang teratur perumusan peraturan-peraturan di bidang perkoperasian, industri dan perdagangan serta peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung iklim kerja yang kondusif.

Beberapa strategi inovatif diharapkan mampu melestarikan UKM batik tulis Jetis pada tahap tahap berikutnya dapat berjalan dengan maksimal dan baik serta membuat kesejahteraan masyarakat khusunya tenaga kerja menjadi meningkat dalam kelangsungan usaha batik tulis Jetis di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang ada diatas dalam mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis di Kabupaten Sidoarjo yang belum adanya kesadaran dalam perkembangannya. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa dalam kontribusi pemerintah untuk mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis kurang begitu maksimal.sehingga perlunya adanya sebuah inovasi untuk memperbaiki atau membenahi kebijakan sehingga bisa menjadi lebih baik pada tahap mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis pada tahap tahap berikutnya.

B. Saran

1. Lebih terintegrasinya pemerintah daerah yang bertugas dalam kelestarian UKM batik tulis Jetis, khususnya dinas dinas yang sudah ditunjuk untuk mendukung kelestarian UKM batik tulis Jetis melalui tenaga kerja pembatiknya di Kabupaten Sidoarjo, agar tidak terjadi kelangkaan tenaga kerja pembatiknya.
2. Melakukan pendekatan secara impersonal sehingga tenaga kerja batik Jetis merasa dihargai dan menampung aspirasi dari tenaga kerja maupun pemilik usaha sehingga mereka bisa mengutarakan apa saja sebenarnya yang mereka butuhkan.
3. Perlu adanya komunikasi secara langsung terbuka antara pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan para tenaga kerja UKM batik tulis Jetis agar mengetahui kelebihan dan kekurangan masing masing pihak. Sehingga dapat menciptakan persamaan persepsi antara arti dari kelestarian UKM batik tulis Jetis sehingga dapat mendukung pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Albury, David. 2003. *Innovation in the Public Sector*. Discussion paper. The Mall.

Anonymous. 2011. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Anonymous. 2011. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Anonymous.2011. *Rencana StrategiDINSOSNAKER Kab. Sidoarjo.*

Anonymous.2011. *Rencana StrategiDISPERINDAG Kab. Sidoarjo.*

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta

Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPSTIE YKPN.

Conyers, Diana. 1992. *Perencanaan sosial didunia ketiga (suatu pengatar)*. Terjemahan Susetiawan. Yogyakarta : Gajahmada Universty press.

Dunn,William N.2000. Analisis kebijakan publik. Yogyakarta : gajahmada university press

Hadjimonalis, Anthanasios., Keith Dickson (2000), Innovation Strategies of SMEs in Cyprus, A Small Developing Country, International Small Business journal . 18,4, pp. 62-79

Indradi, Sjamsiar. 2003. *Hand Out kuliah Program Alih Tahun 2003/3004:* MataKuliah pengantar Ilmu Administrasi Negara. Malang: FIA Unibraw.

Islamy, Irfan.2001.*Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*. Cetakan kesepuluh, Jakarta : Bumi aksara

Jimung, Martin. 2005. *Politik Local dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif*. London.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996.*Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta : Cidensio.

Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah*. Jakarta: UI-Press.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta:Penerbit Erlangga.

Moleong, J Lexy. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.

Muluk, Khairul, 2009, Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah, ITS Press bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Dan Dokumentasi FIA UNIBRAW, Surabaya.

Miles, P Morgan., Covin G jefferey., Heeley b Michael (2000), The Relationship Between Environmental Dynamism and Small Firm structure, strategy, and Performance. Journal of Marketing theory and Practice. Pp. 63-74

Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho,Riant.2003.*Kebijakan Public Formulasi,Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta :PT.gramedia

Nugroho, Riant. 2011. Public Poliy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo kelompok Gramedia

_____. 2006.kebijakan public untuk Negara Negara berkembang (model model perumusan implementasi dan evaluasi).PT.Alex Media Komputindo, Jakarta

Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah,Jakarta : gramedia widiasarana Indonesia

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Porter, Michael E. 1993/1994. Keunggulan bersaing : meciptakan dan mempertahankan kinerja unggul. Harvad Busin

Prawirokusumo, Soeharto. 2001. Ekonomi Rakyat : Konsep, Kebijakan dan Strategi, Yogyakarta: BPFE.

Rogers, E.M., 2003. *Diffusion of Innovations 5 edition*, Free Press. New York.

Rosid, Abdul. 2004. Manajemen Usaha Kecil Dan Koperasi. Modul Manajemen UKM, PKSM mercubuana ac.id. UMB. Diakses, 30 Januari 2014.

Simanjuntak, Payaman. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sugandha, Dann. 1992. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Intermedia.

Struktur administrasi, diakses pada 10 Oktober 2013 dari (www://sidoarjo.go.id).

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta

_____. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

_____. 2009. *MetodePenelitianKuantitatifKualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarif. Teuku 2011. "Kajian Skala Prioritas Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM", Jurnal Koperasi volume 6 Tahun 2011: 24-42.

Tambunan, Tulus. 1999. Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia. Jakarta:PT. Mutiara Sumber Widya.

Taufiq, Muhammad. 2004. "Proyeksi Sentra Menjadi Klaster", Jurnal Infokop No. 25 Tahun XX: 62-74.

Taufiq, Muhammad. 2004. "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)", Jurnal Infokop No. 25 Tahun XX: 1-5.

Tiktik dan Soejoedono. 2004. Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pada Pasal 1 dan pasal 3

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasian Pada Pasal 1 dan Pasal 3 Tujuan Koperasi

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press

Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia

Widjaja, AW. 2005 Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing

Winardi. 1992. *Promosi dan Reklame*. PT Mandar Maju. Bandung.

Zauhar, Susilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang: IKIP Malang.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

KARTU SARAN / REVISI

N A M A : Fara Adiba
NIM : 105030101111019
FAKULTAS : Ilmu Administrasi
JURUSAN / PROGRAM : Administrasi Publik

NO.	HALAMAN	KETERANGAN / SARAN

Malang, 22 April 2014

TANDA TANGAN
PERSETUJUAN REVISI
TANGGAL,

Drs. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

DOSEN PENGUJI / PEMBIMBING

Drs. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

KETERANGAN :
1. REVISI HARUS SELESAI PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN
2. KARTU INI DITUJUKAN KEPADA DOSEN YBS. PADA SAAT KONSULTASI REVISI UNTUK PERSETUJUAN / ACC REVISI.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

SURAT KETERANGAN REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, komisi pembimbing dari mahasiswa :

Nama	: Fara Adiba
NIM	: 105030101111019
Jurusan	: Administrasi Publik
Konsentrasi	: -
Judul Skripsi	: Inovasi kebijakan Ketenaga kerjaan dalam mendukung kelestarian UKM berbasis produk unggulan (Studi pada pengrajin kampung batik Jetis Sidoarjo)

Hari/ tanggal ujian skripsi: Selasa, 22 April 2014

Telah merevisi skripsinya sesuai saran-saran perbaikan dari majelis penguji.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 April 2014

No.	Nama	Pembimbing/ Penguji	Tanda Tangan
1.	Dr. Sarwono, M.Si	Ketua Komisi Pembimbing	
2.	Drs. Abdullah Said, M.Si	Anggota Komisi Pembimbing	
3.	Dr. MARDIYONO, MPA	Penguji I	
4.	Drs. DWI SULISTYO, MPA	Penguji II	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

KARTU SARAN / REVISI

N A M A : Fara Adiba
NIM : 105030101111019
FAKULTAS : Ilmu Administrasi
JURUSAN / PROGRAM : Administrasi Publik

NO.	HALAMAN	KETERANGAN / SARAN
		Abstrak, Ringkasan, Summary
	16	BAB II. A. Admin. Publik dan Kebijakan Publik
	66	BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN
	107	C. Pembahasan
	127	STRATEGY INOVASI KEBIJAKAN
	109	Gambar 11. Peta Analisis agar disempurnakan.

Malang, 22 April 2014

TANDA TANGAN
PERSETUJUAN REVISI
TANGGAL,

Dr. MARDIYONO, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001

DOSEN PENGUJI

Dr. MARDIYONO, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001

KETERANGAN :
1. REVISI HARUS SELESAI PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN
2. KARTU INI DITUJUKAN KEPADA DOSEN YBS. PADA SAAT KONSULTASI REVISI UNTUK PERSETUJUAN / ACC REVISI.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

KARTU SARAN / REVISI

NAMA : Fara Adiba
NIM : 105030101111019
FAKULTAS : Ilmu Administrasi
JURUSAN / PROGRAM : Administrasi Publik

NO.	HALAMAN	KETERANGAN / SARAN
	Summary	Revisi (lihat skripsi) .... to supporting Establishing of SME's bases on good Quality Products!.
	Sumber	semua sumber yg di kutip hrs di Tulis sumbernya dan di Tulis di Daftar Pustaka! (lihat skripsi)
	Bilik	Bilik → Bidik !
	Bab IV	Judul : Penyajian & Pembahasan
	109	Peta analisis → mengacu pada Teori siapa dan eksternal & internal terbalik, Terus Tema kultural menjadi isi apa?.
	analisis	Tambahkan SWOT dan Porter competitive advantages agar Tema kultural lengkap
	127	strategi inovatif penelitian → kebijakan
	Pustaka	Buat lagi fokus

Malang, 22 April 2014

TANDA TANGAN
PERSETUJUAN REVISI
TANGGAL,

Drs. DWI SULISTYO, MPA
NIP. 19590529 198403 1 002

DOSEN PENGUJI

Drs. DWI SULISTYO, MPA
NIP. 19590529 198403 1 002

KETERANGAN :
1. REVISI HARUS SELESAI PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN
2. KARTU INI DITUJUKAN KEPADA DOSEN YBS. PADA SAAT KONSULTASI REVISI UNTUK PERSETUJUAN / ACC REVISI.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

KARTU SARAN / REVISI

N A M A : Fara Adiba
NIM : 105030101111019
FAKULTAS : Ilmu Administrasi
JURUSAN / PROGRAM : Administrasi Publik

NO.	HALAMAN	KETERANGAN / SARAN

Malang, 22 April 2014

TANDA TANGAN
PERSETUJUAN REVISI
TANGGAL,

Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

DOSEN PENGUJI / PEMBIMBING

Dr. Sarwono, M.Si
NIP. 19570909 198403 1 002

KETERANGAN :
1. REVISI HARUS SELESAI PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN
2. KARTU INI DITUJUKAN KEPADA DOSEN YBS. PADA SAAT KONSULTASI REVISI UNTUK PERSETUJUAN / ACC REVISI.